

**PENGARUH KARAKTERISTIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
DI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

WARYANTO
NIM. C2C006152

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Waryanto

Nomor Induk Mahasiswa : C2C006152

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH KARAKTERISTIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
(GCG) TERHADAP LUAS
PENGUNGKAPAN *CORPORATE*
SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
DI INDONESIA**

Dosen Pembimbing : Rr.Sri Handayani, SE.,M.Si., Akt.

Semarang, 27 April 2010

Dosen Pembimbing,

(Rr. Sri Handayani, SE., M.Si., Akt.)
NIP. 19741005 199802 2001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Waryanto
Nomor Induk Mahasiswa : C2C006152
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH KARAKTERISTIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
(GCG) TERHADAP LUAS
PENGUNGKAPAN *CORPORATE*
SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
DI INDONESIA**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal: 6 Mei 2010

Tim Penguji:

1. Rr. Sri Handayani, SE.,M.Si., Akt. (.....)
2. Prof. Dr. Muchammad Syafruddin, M.Si., Akt. (.....)
3. Herry Laksito, SE., M.Adv.Acc., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, WARYANTO, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: *PENGARUH KARAKTERISTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI INDONESIA* adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 27 April 2010

Yang membuat pernyataan,

WARYANTO
NIM. C2C006152

ABSTRACT

This research aims to analyze the Good Corporate Governance (GCG) characteristic factors that influencing the disclosure of corporate social responsibility (CSR) at the corporate's Annual Reports in Indonesia. The Good Corporate Governance (GCG) characteristics that was applied in this research are Board of Commissioner size, Number of Board of Commissioner meetings, Board of Commissioner independence, Audit Committee size, Number of Audit Committee meetings, Audit Committee competence, Managerial ownership, Institutional ownership, Foreign ownership, Concentrated ownership, Firm's size and Leverage ratio.

The population in this research are all of Indonesian firms listed in Indonesian Stock Exchanges (IDX) 2008. Total sample in this research are 116 firms that selected with purposive sampling. Using Content Analysis method to analyze firm's Annual report. Data analyzed with test of classic assumption and examination of hypothesis with multiple linear regression method.

Result of this research indicates that Concentrated ownership, Institutional ownership, Firm's size and Leverage ratio had a significant effect to CSR disclosure in Indonesia.

Keywords: *Corporate social responsibility (CSR), Characteristic of GCG Monitoring mechanism, Board of Commissioner, Audit Committee, Ownership structure.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor karakteristik *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada Laporan Tahunan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Faktor-faktor karakteristik *Good Corporate Governance* yang digunakan antara lain ukuran Dewan Komisaris, jumlah rapat Dewan Komisaris, independensi Dewan Komisaris, ukuran Komite Audit, jumlah rapat Komite Audit, kompetensi Komite Audit, kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham asing, kepemilikan saham terkonsentrasi, ukuran perusahaan dan rasio *leverage*.

Populasi dari penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008. Total sampel penelitian adalah 116 perusahaan yang ditentukan melalui *purposive sampling*. Penelitian ini menganalisis pada laporan tahunan perusahaan dengan metode *Content analysis*. Analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linear berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kepemilikan saham terkonsentrasi, ukuran perusahaan, dan rasio *leverage* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR di Indonesia.

Kata kunci: *Corporate social responsibility* (CSR), Karakteristik GCG, Mekanisme pengawasan, Dewan Komisaris, Komite Audit, Struktur kepemilikan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘Aalamiin.. Segala Puji Syukur bagi Allah SWT, atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya yang selalu tercurah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*PENGARUH KARAKTERISTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI INDONESIA*”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi sarjana S-1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Drs. H.M. Chabachib, MSi., Akt selaku Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Muchammad Syafruddin, MSi., Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Dosen Wali yang selalu memberikan nasehat dan motivasi.
3. Ibu Rr.Sri Handayani, SE.,MSi., Akt selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu dan segenap tenaga serta saran dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, materi dan motivasi yang tak pernah terputus. Sungguh tanpa kalian aku ini bukanlah apa-apa, terima kasih untuk setiap cucuran keringat kalian.
5. Seluruh staf pengajar, Bapak dan Ibu dosen, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa.
7. Lizna Qu yang selalu memberi semangat, dukungan, doa, perhatian dan menemani disaat susah dan senang, tempatku meluapkan keluh kesah.
8. Mbak Atiq, Mas Faiz , dan dek Akmal atas dukungan dan doanya selama ini, semoga kita bisa membahagiakan orang tua kita.
9. Sahabat-sahabatku Whisnu Adhinegoro, Ibrahim Adi, Diaz Haryokusumo, kalian telah banyak memberikan inspirasi dan motivasi dalam hidupku, semoga kita bisa sukses dunia dan akhirat.
10. Teman-teman di Kos Putera “Rumah Coklat”: Mas Heri, Adi“paw”, Adi“plengeh”, Diaz“pasha”, Edho”Ndut”, Aldo”gaptek”, Toni”mr.higien”, Arif”ucil”, Dimas”bewok”, terimakasih atas kebersamaan menjadi penghuni rumah yang elit dan panas, tetap ingat “*gak semua yang Lo denger itu bener!*”
11. Teman-teman Tim Futsal “Joga Autiz” Manajemen Reg.2 2005: Deddy, Adi, Toni, Gilang, Dito, Reza, Agung, Hendri, Suryo, Rikky bersama kalian

menjadi pemain Futsal yang keren dan ganteng, tak pernah ku jumpai tim seunik kalian.

12. Teman-teman D'martines Band (Willy Wonka): Vaza, Gani, Pune, Dimas, Bima beserta keluarga groupisnya, kalian memberikan warna tersendiri dalam masa kuliahku, kita akan buktikan akademis Oke, non-akademis juga Oke !!
13. Teman-teman seperjuangan dan satu bimbingan Rizky, Estorina, dan Rumenta yang bisa menjadi tempat untuk berdiskusi, komunikasi dan saling support tentang masalah skripsi kita. Dan Seluruh teman-teman Akuntansi angkatan 2006, terima kasih atas persahabatan, kekeluargaan, dan kebersamaannya selama di bangku kuliah. Mari kita berjuang pada level hidup yang lebih berat, semoga kita semua Sukses. Berbagi info untuk berbisnis dan *job vacancy, keep contact ya prend...*
14. Teman-teman Keluarga Mahasiswa Akuntansi (KMA) yang telah memberikan pelajaran dan pengalaman organisasi yang begitu berharga, khususnya Mba Kiky 05, Mba Sita 05, Mba Betria 05, Mba Icha 05, Mba daning 05, Mba Yanti 05, Mas Angga 05, Mas Dedi 05, Dek Listiana 08 yang telah berbagi ilmu dengan buku-buku yang sangat bermanfaat.
15. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semarang, April 2010

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"...Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan (nasib) suatu Kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri..." (QS. Ar Ra'd : 11)

"...Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Aku akan menambah (ni'mat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (ni'mat-Ku), maka sesungguhnya Azab-Ku sangatlah pedih" (QS. Ibrahim : 7)

"Seimbanglah dalam segala hal, karena dengan keseimbangan semua menjadi indah dan nikmat..."

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- *Bapak dan Ibuku tercinta atas segala cucuran peluh dan air mata, tak henti membimbingku dalam setiap langkah dan doa...*
- *Mba dan Mas, serta Keponakanku tersayang yang memberikan banyak inspirasi...*
- *Sahabat, Kekasih, dan Saudara yang telah memberi semangat, nasihat dan motivasi dalam hidupku...*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	15
2.1.1 Teori Agensi	15
2.2 <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	18
2.2.1 Pengertian dan Konsep CSR	18
2.2.2 Pengungkapan CSR di Indonesia	20
2.3 <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	25
2.3.1 Pengertian dan Konsep GCG	25
2.3.2 Dewan Komisaris	28
2.3.3 Komite Audit	32
2.3.4 Perkembangan GCG di Indonesia	35
2.4 Penelitian Terdahulu	38
2.5 Kerangka Pemikiran	43

2.6 Pengembangan Hipotesis	45
2.6.1 Ukuran Dewan Komisaris	45
2.6.2 Jumlah Rapat Dewan Komisaris	46
2.6.3 Independensi Dewan Komisaris	47
2.6.4 Ukuran Komite Audit	49
2.6.5 Jumlah Rapat Komite Audit	50
2.6.6 Kompetensi Komite Audit	51
2.6.7 Kepemilikan Saham Manajerial	52
2.6.8 Kepemilikan Saham Institusional	53
2.6.9 Kepemilikan Saham Asing	55
2.6.10 Kepemilikan Saham Terkonsentrasi	56
2.6.11 Ukuran Perusahaan	57
2.6.12 Rasio <i>Leverage</i>	58

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	59
3.1.1 Variabel Terikat (dependen)	59
3.1.2 Variabel Bebas (independen)	60
3.1.3 Variabel Kontrol	63
3.2 Populasi dan Sampel penelitian	64
3.3 Jenis dan Sumber Data	65
3.4 Metode Pengumpulan Data	65
3.5 Metode Analisis Data	65
3.5.1 Uji Asumsi Klasik	65
3.5.1.1 Uji Normalitas	66
3.5.1.2 Uji Multikolinearitas	67
3.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas	67
3.5.2 Analisa Regresi Berganda	68
3.5.3 Pengujian Hipotesis	70
3.5.3.1 Uji F (F test)	70
3.5.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	71
3.5.3.3 Uji t (t test)	72

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Deskripsi Objek Penelitian	73
4.2	Analisis Data	73
4.2.1	Statistik Deskriptif	73
4.2.2	Hasil Uji Asumsi Klasik	79
4.2.2.1	Hasil Uji Normalitas	79
4.2.2.2	Hasil Uji Multikolinearitas	81
4.2.2.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	82
4.2.3	Hasil Pengujian Hipotesis	84
4.2.3.1	Hasil Uji F (F test)	84
4.2.3.2	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	84
4.2.3.3	Hasil Uji t (t test)	86
4.3	Interpretasi Hasil	91
4.3.1	Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	91
4.3.2	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan CSR	93
4.3.3	Pengaruh Jumlah rapat Dewan Komisaris terhadap pengungkapan CSR	94
4.3.4	Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap pengungkapan CSR	95
4.3.5	Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap pengungkapan CSR	96
4.3.6	Pengaruh Jumlah rapat Komite Audit terhadap pengungkapan CSR	97
4.3.7	Pengaruh Kompetensi Komite Audit terhadap pengungkapan CSR	98
4.3.8	Pengaruh Kepemilikan saham Manajerial terhadap pengungkapan CSR	99
4.3.9	Pengaruh Kepemilikan saham Institusional terhadap pengungkapan CSR	100
4.3.10	Pengaruh Kepemilikan saham Asing terhadap pengungkapan CSR	101

4.3.11 Pengaruh Kepemilikan saham terkonsentrasi terhadap pengungkapan CSR	102
4.3.12 Pengaruh Ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR	103
4.3.13 Pengaruh Rasio <i>Leverage</i> perusahaan terhadap pengungkapan CSR	104
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan	106
5.2 Keterbatasan	108
5.3 Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	115

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	41
Tabel 4.1 Ringkasan Perolehan Sampel Penelitian.....	73
Tabel 4.2 Stastistik Deskriptif.....	74
Tabel 4.3 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov.....	81
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	82
Tabel 4.5 Hasil Uji F (F test)	84
Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi	85
Tabel 4.7 Hasil Uji t	87

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur <i>Board of Director</i> dalam <i>One Tier System</i>	28
Gambar 2.2 Struktur <i>BoD dan BoC</i> dalam <i>Two Tiers System Indonesia</i>	29
Gambar 2.3 Skema Kerangka Pemikiran	44
Gambar 4.1 Grafik Histogram Uji Normalitas	80
Gambar 4.2 Grafik Normal P-P Plot Uji Normalitas	80
Gambar 4.3 Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas	83

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A : Daftar Indikator Pengungkapan CSR menurut GRI	115
Lampiran B : Daftar Perusahaan Sampel Penelitian	120
Lampiran C : Hasil Pengolahan Data Dengan SPSS 17.0	123

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan (Post *et.al.*, 2002 dalam Solihin, 2009). Menurut The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), *Corporate Social Responsibility* (CSR) didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan.

Perusahaan akan mengungkapkan praktik tanggung jawab sosial agar bentuk kontribusi yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat diketahui oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Pengungkapan tanggung jawab sosial atau sering disebut sebagai *Corporate social reporting* adalah proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan atas tindakan-tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan (Gray *et. al.*, 1987 dalam Rosmasita, 2007).

Menurut Utama (2007) praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia mulai berkembang seiring dengan semakin meningkatnya perhatian masyarakat global terhadap perkembangan perusahaan-perusahaan trans-nasional atau multinasional yang beroperasi di Indonesia. Selain itu, hal ini juga terkait dengan isu kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia, seperti penggundulan hutan, polusi udara dan air, hingga perubahan iklim. Berbagai kasus pencemaran lingkungan seperti yang terjadi pada kasus Free Port di Papua dan Newmond di Sulawesi banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan disekitar perusahaan beroperasi telah memberikan pelajaran bagi perusahaan-perusahaan untuk lebih peduli dengan masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Perkembangan praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia juga dilatar belakangi oleh dukungan pemerintah, yaitu dengan dikeluarkannya regulasi terhadap kewajiban praktik dan pengungkapan CSR melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, pasal 66 dan 74. Pada Pasal 66 ayat (2) bagian c disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan dalam Pasal 74 menjelaskan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu, kewajiban pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 pasal 15 bagian b, pasal 17, dan pasal 34 yang mengatur setiap penanaman modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan.

Dengan melakukan praktik dan pengungkapan CSR, perusahaan akan mendapatkan manfaat tersendiri. Sebagaimana pendapat Kotler dan Lee (2005) dalam Solihin (2009) menyebutkan bahwa perusahaan akan terdorong untuk melakukan praktik dan pengungkapan CSR, karena memperoleh beberapa manfaat seperti peningkatan penjualan dan *market share*, memperkuat *brand positioning*, meningkatkan citra perusahaan, menurunkan biaya operasi, serta meningkatkan daya tarik perusahaan di mata investor dan analis keuangan.

Praktik dan pengungkapan CSR merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep *Good Corporate Governance* (GCG), yang prinsipnya antara lain menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholders*-nya, sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerjasama yang aktif dengan *stakeholders* demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan (Utama, 2007). Selain itu, Utama (2007) juga menyatakan bahwa mekanisme dan struktur *governance* di perusahaan dapat dijadikan sebagai infrastruktur pendukung terhadap praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia. Dengan adanya mekanisme dan struktur *governance* ini dapat mengurangi asimetri informasi. Apabila asimetri informasi dibiarkan terjadi, maka dapat menyebabkan terjadinya *adverse selection* maupun *moral hazard*, dengan konsekuensi perusahaan tidak melaksanakan praktik dan pengungkapan CSR.

Menurut Monks (2003) dikutip dalam Kaihatu (2006) mekanisme *Good corporate governance* (GCG) akan bermanfaat dalam mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders*. Untuk mendukung hal tersebut, pelaksanaan GCG

harus didukung dengan organ perusahaan yang harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Organ perusahaan tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris, serta organ perusahaan lain yang membantu terwujudnya *good governance* seperti sekretaris perusahaan, komite Audit, dan komite-komite lain yang membantu pelaksanaan GCG.

Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan memberikan petunjuk dan arahan kepada pengelola perusahaan atau pihak manajemen. Dalam hal ini, manajemen bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen (FCGI, 2002). Hal ini berarti Dewan Komisaris dapat melakukan pengawasan sehingga menjamin bahwa manajemen bertindak sesuai dengan pemilik perusahaan (investor) dan informasi yang dimiliki oleh manajemen akan diungkapkan semua kepada para *stakeholders*, termasuk juga informasi mengenai praktik tanggung jawab sosial perusahaan.

Dalam menjalankan tugasnya Dewan komisaris dapat membentuk komite-komite yang mendukung tercapainya pelaksanaan GCG oleh perusahaan, salah satunya adalah Komite Audit. Menurut Alijoyo (2003) Komite Audit mempunyai fungsi membantu Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan; Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan;

Meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit; dan Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Dengan demikian, hasil pengungkapan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan dapat memiliki tingkat kehandalan atau reliabilitas yang tinggi. Dalam hal ini juga termasuk dalam laporan tahunan, sebagaimana hasil penemuan Foker (1992) dalam Said *et.al.* (2009) bahwa keberadaan Komite Audit dapat mengurangi biaya agensi, dan meningkatkan pengendalian internal serta meningkatkan kualitas pengungkapan.

Konsep *corporate governance* dilatar belakangi oleh masalah pemisahan antara kepemilikan dengan pengelolaan di dalam perusahaan, yang selanjutnya dimodelkan dengan *Agency Theory* (Syakhroza, 2003 dalam Ibrahim, 2007). Dalam mekanisme GCG, pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan merupakan upaya yang sangat penting untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan ini akan timbul suatu masalah agensi, yaitu terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan manajer (agen) karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Sebagaimana disebutkan oleh Babic (2001) dalam Nuryaman (2008), bahwa struktur kepemilikan merupakan salah satu mekanisme internal untuk mengendalikan masalah agensi pada perusahaan.

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu bentuk struktur kepemilikan yang dapat mengatasi masalah agensi yang menyebabkan terciptanya konsep GCG. Jensen & Meckling (1976) membentuk suatu teori yang menyatakan bahwa

kepemilikan saham oleh manajemen akan menurunkan permasalahan agensi karena semakin banyak saham yang dimiliki oleh manajemen maka semakin kuat motivasi mereka untuk bekerja dalam meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini berarti konflik kepentingan akan dapat dikurangi, karena manajemen akan berusaha menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan perusahaan (investor), salah satunya dengan melakukan praktik dan pengungkapan CSR.

Mekanisme struktur kepemilikan yang lain yaitu struktur kepemilikan institusional. Menurut Tarjo (2008), kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perseroan terbatas, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan saham oleh institusi dianggap sebagai *sophisticated investor* karena mereka merupakan investor yang tidak mudah dibohongi manajer. Menurut Machmud dan Djakman (2008) dengan jumlah kepemilikan yang cukup signifikan dapat memonitor manajemen sehingga dapat mengurangi masalah keagenan tersebut. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. Hal ini berarti kepemilikan institusional dapat menjadi pendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial.

Selain struktur kepemilikan tersebut diatas, Menurut Macmud dan Djakman (2008) struktur kepemilikan asing dalam perusahaan juga akan mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Hal ini dikarenakan pihak asing dianggap lebih *concern* terhadap pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan multinasional yang berada di Indonesia, terutama yang berasal dari Eropa dan *United State*, lebih memperhatikan isu-isu sosial seperti: pelanggaran hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja, dan isu lingkungan seperti, efek rumah kaca, pembalakan liar, serta pencemaran air.

Struktur kepemilikan saham yang lain yaitu kepemilikan saham terkonsentrasi. Penelitian Abdul samad (2002) dalam Said *et.al.* (2009) menemukan bahwa kepemilikan saham di Malaysia sebagian besar adalah terkonsentrasi, sehingga dalam hal ini kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada perusahaan mengakibatkan hak pemegang saham minoritas secara praktis tidak mempunyai kekuatan atau *powerless*. Pemegang saham minoritas tidak dapat ikut serta menentukan keputusan implementasi strategi perusahaan dengan kuat. Namun demikian, menurut Nuryaman (2008) Konsentrasi kepemilikan dapat menjadi mekanisme internal pendisiplinan manajemen, sebagai salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas monitoring, karena dengan kepemilikan yang besar menjadikan pemegang saham memiliki akses informasi yang cukup signifikan untuk mengimbangi keuntungan informasional yang dimiliki manajemen. Dalam hal ini, kepemilikan mayoritas atau terkonsentrasi dapat mengurangi masalah agensi dan dapat mendorong pengungkapan CSR secara luas.

Penelitian terdahulu telah dilakukan di Indonesia untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan pengungkapan CSR. Penelitian yang dilakukan oleh Angraini (2006) berhasil menemukan faktor

kepemilikan manajemen dan jenis industri menjadi bahan pertimbangan oleh perusahaan untuk mengungkapkan CSR. Rosmasita (2007) menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR suatu perusahaan dalam hal ini hanya pada laporan tahunan perusahaan manufaktur antara lain: kepemilikan manajemen, *leverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Penelitian lain dilakukan oleh Puspitasari (2009) menemukan bahwa faktor kepemilikan saham asing, kepemilikan saham publik, ukuran industri dan tipe industri berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR di Indonesia.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu ditunjukkan dalam penelitian Amran dan Devi (2008), Machmud dan Djakman (2008), dan Said *et.al.* (2009) tidak menemukan adanya hubungan antara faktor kepemilikan saham Asing terhadap luas pengungkapan CSR. Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Puspitasari (2009) yang menemukan bahwa kepemilikan saham Asing mempunyai pengaruh positif dengan luas pengungkapan CSR.

Penelitian lain yang dilakukan Anggraini (2006) dan Rosmasita (2007) menemukan hubungan positif antara kepemilikan saham manajerial dengan luas pengungkapan CSR, namun hasil berbeda ditemukan dalam penelitian Said *et.al.* (2009) bahwa kepemilikan saham manajerial tidak berhubungan dengan luas pengungkapan CSR.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Said *et. al.* (2009). Penelitian terdahulu dilakukan oleh Said *et.al.* (2009) dengan *setting* di Malaysia, menggunakan sampel 150 perusahaan yang tercatat di Bursa Malaysia meneliti beberapa variabel karakteristik GCG antara lain adalah ukuran Dewan

Direksi (*board size*), Independensi Dewan Komisaris, *Duality of CEO*, Independensi Komite Audit, dan variabel kepemilikan saham terkonsentrasi, manajerial, asing, serta kepemilikan oleh pemerintah. Penelitian tersebut menemukan bahwa hanya dua faktor yang berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di Malaysia yaitu faktor Kepemilikan oleh Pemerintah dan Komite Audit.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain terdapat pada pengukuran (*proxy*) yang digunakan untuk mengukur variabel Dewan komisaris yang sebelumnya hanya mengukur independensi, dalam penelitian ini akan diukur juga mengenai ukuran dan jumlah rapat Dewan Komisaris. Variabel ukuran Dewan Direksi (*board size*) tidak digunakan dalam penelitian ini, dikarenakan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, dimana perusahaan-perusahaan di Indonesia menerapkan sistem Dua tingkat atau *Two Tier Board System*, yang memisahkan fungsi eksekutif (direksi) dan fungsi pengawasan (komisaris).

Pada variabel Komite Audit, diukur dengan ukuran Komite Audit, frekuensi jumlah pertemuan komite audit, serta kompetensi komite audit. Hal ini didasarkan pada keputusan Bapepam-LK Nomor Kep-29/PM/2004 nomor IX.I.5 tentang pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Selain itu, pada variabel kepemilikan saham oleh pemerintah tidak diadopsi dikarenakan jumlah emiten di Indonesia yang dimiliki oleh pemerintah jumlahnya terlalu sedikit sehingga tidak cukup mewakili sampel penelitian.

Penelitian ini dimotivasi karena masih rendahnya kualitas dan kuantitas praktik pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia bila dibandingkan dengan Negara-negara lain (www.csrindonesia.com). Terjadinya *fenomena gap* ini dikarenakan perusahaan-perusahaan di Indonesia belum mampu menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik. Sebagaimana disampaikan Utama (2007), bahwa *Corporate Governance* perusahaan akan menentukan arah dan kebijakan perusahaan, termasuk diantaranya kegiatan CSR beserta pelaporannya, maka apabila perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah menerapkan GCG, seharusnya praktik pelaksanaan dan pengungkapan CSR akan semakin baik. Selain itu, penelitian ini juga dimotivasi karena adanya *research gap* atau ketidakkonsistenan hasil yang terjadi pada penelitian-penelitian terdahulu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan GCG dapat mempengaruhi pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, penulis mengambil penelitian dengan judul ***“Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia”***.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah “Apakah karakteristik *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada laporan tahunan

perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)?"'. Sesuai dengan perumusan masalah tersebut, maka dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Ukuran Dewan Komisaris dapat mempengaruhi luas pengungkapan CSR di Indonesia?
2. Apakah Jumlah pertemuan Dewan Komisaris dapat mempengaruhi luas pengungkapan CSR di Indonesia?
3. Apakah proporsi Dewan Komisaris Independen dapat mempengaruhi luas pengungkapan CSR di Indonesia?
4. Apakah Ukuran Komite Audit dapat mempengaruhi luas pengungkapan CSR di Indonesia?
5. Apakah Jumlah Pertemuan Komite Audit dapat mempengaruhi luas pengungkapan CSR di Indonesia?
6. Apakah Kompetensi Komite Audit dapat mempengaruhi luas pengungkapan CSR di Indonesia?
7. Apakah Kepemilikan Manajerial dapat mempengaruhi luas pengungkapan CSR di Indonesia?
8. Apakah Kepemilikan Institusional dapat mempengaruhi luas pengungkapan CSR di Indonesia?
9. Apakah Kepemilikan Asing dapat mempengaruhi luas pengungkapan CSR di Indonesia?
10. Apakah Kepemilikan Terkonsentrasi dapat mempengaruhi luas pengungkapan CSR di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk secara umum untuk memverifikasi teori yang telah ada dalam menjelaskan mengenai hubungan antara karakteristik GCG terhadap luas pengungkapan CSR. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik *Good Corporate Governance* (GCG) yang diprosikan melalui Dewan Komisaris, Komite Audit, Struktur Kepemilikan, Ukuran perusahaan dan Rasio *leverage* terhadap luas pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan publik di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu Akuntansi Manajemen, terutama mengenai bagaimana penerapan GCG dalam suatu perusahaan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan untuk mengungkapkan praktik CSR-nya dalam laporan tahunan perusahaan.
2. Memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan/manajemen tentang manfaat penerapan dan mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) dan pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan bagi perusahaan.
3. Sebagai bahan pertimbangan Pemerintah dan lembaga-lembaga penyusun standar akuntansi dalam meningkatkan kualitas standar dan peraturan yang sudah ada.

4. Sebagai bahan referensi atau acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi lima bagian. Bagian pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang gambaran penelitian secara garis besar penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini terdiri dari latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bagian yang kedua adalah tinjauan pustaka yang akan menguraikan mengenai teori-teori yang melandasi dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam bagian ini juga dijelaskan mengenai penelitian terdahulu yang membantu menjelaskan mengenai permasalahan yang akan diteliti. Selain itu diuraikan juga mengenai perumusan hipotesis penelitian yang akan diuji dan kerangka pemikiran yang dipergunakan untuk mempermudah dalam pemahaman penelitian ini.

Bagian yang ketiga dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang berisi uraian mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini dan juga membahas mengenai variabel-variabel penelitian dan pengukurannya, penentuan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

Bagian keempat dalam penelitian ini adalah hasil dan pembahasan penelitian yang berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian. Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji

normalitas, multikolinearitas, dan heterokedastisitas. Setelah semua uji terpenuhi, baru dilakukan uji hipotesis.

Bagian kelima merupakan penutup dalam penelitian ini yang berisi tentang simpulan dari penelitian yang menjawab seluruh pertanyaan penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Dalam rangka memahami konsep *Good Corporate Governance* (GCG), maka digunakanlah dasar perspektif hubungan keagenan. Hubungan keagenan merupakan hubungan antara dua pihak dimana salah satu pihak menjadi *agent* dan pihak yang lain bertindak sebagai *principal* (Hendriksen dan Van Breda, 2000). Hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut.

Eisenhardt (1989) dikutip dalam Isnanta (2008) menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori agensi yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut, manajer sebagai manusia kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan adanya konflik kepentingan dalam hubungan keagenan. Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Teori Agensi mampu menjelaskan potensi konflik kepentingan diantara berbagai pihak yang

berkepentingan dalam perusahaan tersebut. Konflik kepentingan ini terjadi dikarenakan perbedaan tujuan dari masing-masing pihak berdasarkan posisi dan kepentingannya terhadap perusahaan (Ibrahim, 2007). Sebagai agen, manajer bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*), namun demikian manajer juga menginginkan untuk selalu memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Ali, 2002 dalam Isnanta, 2008).

Selain itu, Teori Agensi juga menjelaskan mengenai masalah asimetri informasi (*information asymmetric*). Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (Hendriksen dan Van Breda, 2000).

Asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan tindakan oportunistik seperti manajemen laba (*earnings management*) mengenai kinerja ekonomi perusahaan sehingga dapat merugikan pemilik (pemegang saham). Manajer akan berusaha melakukan hal tersebut untuk memaksimalkan

kepentingan pribadinya tanpa persetujuan pemilik atau pemegang saham. Penelitian Richardson (1998) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menunjukkan adanya hubungan positif antara asimetri informasi dengan manajemen laba. Dalam hal ini berarti apabila manajer memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pemegang saham maka kecenderungan manajer untuk berbuat curang dengan praktik manajemen laba demi kepentingan pribadi akan semakin tinggi.

Dengan adanya masalah agensi yang disebabkan karena konflik kepentingan dan asimetri informasi ini, maka perusahaan harus menanggung biaya keagenan (*agency cost*). Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan biaya keagenan dalam tiga jenis yaitu:

1. Biaya Monitoring (*monitoring cost*), merupakan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh agen.
2. Biaya Bonding (*bonding cost*), merupakan biaya untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak merugikan prinsipal, atau dengan kata lain untuk meyakinkan agen, bahwa prinsipal akan memberikan kompensasi jika agen benar-benar melakukan tindakan tersebut.
3. Biaya kerugian residual (*residual loss*), merupakan nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kemakmuran yang dialami oleh prinsipal akibat dari perbedaan kepentingan.

Teori Agensi juga menyatakan bahwa konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang dapat

menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada dalam perusahaan (Ibrahim, 2007). Mekanisme pengawasan yang dimaksud dalam teori agensi dapat dilakukan dengan mekanisme *good corporate governance* (GCG). GCG sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan diharapkan dapat memberikan kepercayaan terhadap manajemen dalam mengelola kekayaan pemilik (pemegang saham), sehingga dapat meminimalkan konflik kepentingan dan meminimumkan biaya keagenan. Herawaty (2008) juga menyatakan bahwa *Good corporate governance* (GCG) menghasilkan berbagai mekanisme yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen selaras dengan kepentingan pemegang saham (terutama *minority interest*).

Konsep GCG berkaitan dengan bagaimana para pemilik (pemegang saham) yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan melakukan kecurangan-kecurangan yang akan merugikan para pemegang saham. Dengan kata lain dengan penerapan *Good corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*).

2.2 Corporate Social Responsibility (CSR)

2.2.1 Pengertian dan Konsep CSR

Ada berbagai definisi tentang CSR, antara lain definisi CSR menurut The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) sebagai berikut:

Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large

Berdasarkan pengertian tersebut, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu komitmen bisnis yang berkelanjutan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan. Sependapat dengan hal tersebut, Ebert (2003) dalam Rosmasita (2007) mendefinisikan *corporate social responsibility* sebagai usaha perusahaan untuk menyeimbangkan komitmen-komitmennya terhadap kelompok-kelompok dan individual-individual dalam lingkungan perusahaan tersebut, termasuk didalamnya adalah pelanggan, perusahaan-perusahaan lain, para karyawan, dan investor.

CSR berusaha memberikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Darwin (2004) dalam Anggraini (2006) Pertanggungjawaban sosial adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang melebihi tanggung jawabnya di bidang hukum. Dengan demikian, operasi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya berkomitmen dengan ukuran keuntungan secara finansial saja, tetapi juga harus berkomitmen pada pembangunan sosial ekonomi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Berbagai definisi di atas sesuai dengan definisi CSR dalam ISO 26000 (www.csrindonesia.com):

Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment through transparent and ethical behaviour that is consistent with sustainable development and welfare of society; takes into account the expectation of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian mengenai CSR pada intinya adalah merupakan suatu upaya tanggung jawab perusahaan atau organisasi atas dampak yang ditimbulkan dari keputusan dan aktivitas yang telah diambil dan dilakukan oleh organisasi tersebut, dimana dampak itu pastinya akan dirasakan oleh pihak-pihak terkait termasuk masyarakat dan lingkungan.

2.2.2 Pengungkapan CSR di Indonesia

Pengungkapan tanggung jawab sosial atau sering disebut sebagai *Corporate social reporting* adalah proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan atas tindakan-tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan (Gray *et. al.*, 1987 dalam Rosmasita, 2007). Kontribusi negatif perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya telah menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat, oleh karena itu dengan mengungkapkan informasi-informasi mengenai operasi perusahaan sehubungan dengan lingkungan sebagai tanggung jawab perusahaan diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat. Jadi agar bentuk tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan dapat diketahui oleh berbagai pihak yang berkepentingan, maka hal itu diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan.

Hal serupa disampaikan oleh Darwin (2007) dikutip dalam Machmud dan Djakman (2008) bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial bertujuan untuk

menjalin hubungan komunikasi yang baik dan efektif antara perusahaan dengan publik dan *stakeholders* lainnya tentang bagaimana perusahaan telah mengintegrasikan kepedulian dan tanggung jawab sosial (CSR) dalam setiap aspek kegiatan operasinya. Pengungkapan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi di dalam laporan tahunan atau laporan terpisah adalah untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas, responsibilitas, dan transparansi perusahaan kepada investor dan *stakeholders* lainnya. Laporan tahunan merupakan salah satu alat yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan pengungkapan dan pertanggungjawaban kinerja perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat. Para pengguna laporan tahunan seperti analis, investor, masyarakat dan lainnya membutuhkan informasi yang lengkap mengenai laporan tentang suatu perusahaan, sehingga pengungkapan yang lebih rinci mengenai perusahaan akan sangat penting dan bermanfaat untuk melakukan penilaian dan analisis pengambilan keputusan yang akan mereka lakukan.

Dengan melakukan praktik dan pengungkapan CSR, perusahaan akan mendapatkan manfaat tersendiri. Menurut Kotler dan Lee (2005) dalam Solihin (2009) menyebutkan bahwa perusahaan akan terdorong untuk melakukan praktik dan pengungkapan CSR, karena memperoleh beberapa manfaat seperti peningkatan penjualan dan *market share*, memperkuat *brand positioning*, meningkatkan citra perusahaan, menurunkan biaya operasi, serta meningkatkan daya tarik perusahaan di mata investor dan analis keuangan.

Menurut Taridi (2009) ada beberapa manfaat dari praktik dan pengungkapan CSR bagi perusahaan, antara lain:

1. Pengelolaan sumber daya korporasi secara amanah dan bertanggungjawab, yang akan meningkatkan kinerja korporasi secara *sustainable*.
2. Perbaiki citra korporasi sebagai agen ekonomi yang bertanggungjawab (*good corporate citizen*) sehingga meningkatkan nilai perusahaan (*value of the firm*).
3. Peningkatkan keyakinan investor terhadap korporasi sehingga menjadi lebih atraktif sebagai target investasi.
4. Memudahkan akses terhadap investasi domestik dan asing.
5. Melindungi Direksi dan Dewan Komisaris dari tuntutan hukum.

Kewajiban pengungkapan CSR di Indonesia telah diatur dalam beberapa regulasi, antar lain adalah pernyataan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyarankan kepada perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab mengenai sosial dan lingkungan, sebagaimana dituangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 1998) Paragraf kesembilan:

Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.

Secara yuridis formal, pemerintah telah mendukung praktik dan pengungkapan tanggung jawab sosial melalui Undang undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab IV pasal 66 ayat 2(c) dan Bab V pasal 74. Pada Pasal 66 ayat 2 bagian c disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan dalam Pasal 74 menjelaskan kewajiban untuk

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu, kewajiban pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 pasal 15 bagian b, pasal 17, dan pasal 34 yang mengatur setiap penanaman modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan.

Standar pengungkapan CSR yang berkembang di Indonesia adalah merujuk standar yang dikembangkan oleh GRI (*Global Reporting Initiatives*). Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Manajemen (IAI-KAM) atau sekarang dikenal dengan Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) merujuk standar yang dikembangkan oleh GRI dalam pemberian penghargaan *Indonesia Sustainability Report Awards* (ISRA) kepada perusahaan-perusahaan yang ikut serta dalam membuat laporan keberlanjutan atau *sustainability report*. Standar GRI dipilih karena lebih memfokuskan pada standar pengungkapan berbagai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, *rigor*, dan pemanfaatan *sustainability reporting*.

Dalam Standar GRI (GRI, 2006) Indikator kinerja di bagi menjadi 3 komponen utama, yaitu ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial yang mencakup hak azasi manusia, praktek ketenagakerjaan dan lingkungan kerja, tanggung jawab produk, dan masyarakat. Total indikator kinerja mencapai 79 indikator, terdiri dari 9 indikator ekonomi, 30 indikator lingkungan hidup, 14 indikator praktek tenaga kerja, 9 indikator Hak Asasi manusia, 8 indikator kemasyarakatan, dan 9 indikator tanggung jawab produk.

Jadi, dalam melakukan penilaian luas pengungkapan CSR, item-item yang akan diberikan skor akan mengacu kepada indikator kinerja atau item yang disebutkan dalam GRI *guidelines*, minimal yang harus ada antara lain:

- 1) Indikator kinerja ekonomi, meliputi aspek Kinerja ekonomi, Keberadaan pasar; dan Dampak ekonomi tidak langsung.
- 2) Indikator kinerja lingkungan hidup, meliputi aspek Material, Energi, Air, Keanekaragaman Hayati, Emisi, Effluent, dan limbah; Produk dan jasa, Aspek Kesesuaian, Transportasi, dan Aspek secara keseluruhan.
- 3) Indikator kinerja praktek ketenagakerjaan dan lingkungan kerja, meliputi aspek Ketenagakerjaan, Hubungan Tenaga kerja/Manajemen, Keselamatan dan kesehatan kerja, Pendidikan dan pelatihan, serta aspek Keanekaragaman dan kesempatan yang sama.
- 4) Indikator kinerja hak azasi manusia, meliputi aspek Praktek investasi dan pengadaan, Aspek Non-diskriminasi, Kebebasan berserikat dan Daya tawar kelompok, Tenaga kerja anak, Pegawai tetap dan kontrak, Praktik keselamatan serta Hak Masyarakat (Adat).
- 5) Indikator kinerja Masyarakat, meliputi aspek Kemasyarakatan, Kebijakan mengenai korupsi, Kebijakan umum/publik, Perilaku Anti Persaingan, dan aspek kesesuaian.
- 6) Indikator kinerja Tanggung jawab produk, yang meliputi aspek Keselamatan dan kesehatan konsumen, Labeling produk dan jasa, Komunikasi pemasaran, Privasi konsumen dan aspek kesesuaian.

2.3 Good Corporate Governance (GCG)

2.3.1 Pengertian dan Konsep GCG

Good Corporate Governance atau yang biasa disingkat GCG berasal dari istilah “*corporate governance*” yang berarti tata kelola perusahaan, merupakan suatu bentuk analogi antara pemerintahan suatu Negara dengan pemerintahan dalam suatu perusahaan (Becht *et al.*, 2002 dalam Solihin, 2009). Sebagaimana dalam pemerintahan suatu negara, dalam perusahaan juga terdapat berbagai kelompok dengan berbagai kepentingan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu muncul sebuah konsep *corporate governance* dalam mengatasi konflik kepentingan tersebut agar perusahaan dapat dikelola dengan baik.

Menurut OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), *corporate governance* didefinisikan sebagai berikut:

“Corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, managers, shareholders, and other stakeholders”

Dari pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa tujuan *corporate governance* adalah untuk mengendalikan dan mengarahkan perusahaan agar dapat mendistribusikan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan dengan baik atau dengan kata lain GCG bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemegang kepentingan (*stakeholders*).

Definisi menurut FCGI (Forum for Corporate Governance in Indonesia) dalam publikasi yang pertamanya mempergunakan definisi Cadbury Committee tidak berbeda jauh dengan definisi menurut OECD, yaitu:

"seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan."

Pengertian dan konsep *corporate governance* ini dilandasi dengan Teori Agensi (*agency theory*) dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Solihin, 2009). Dengan adanya mekanisme *Corporate governance* ini, maka tindakan kecurangan yang dilakukan agen dapat diminimalisasi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip GCG seperti yang telah disebutkan dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang disusun oleh Komite Nasional kebijakan Governance (KNKG) tahun 2006. Prinsip-prinsip tersebut meliputi lima aspek yaitu:

- 1) Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3) Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4) Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Untuk mewujudkan terciptanya *Good corporate governace*, prinsip-prinsip tersebut harus dapat dicapai oleh perusahaan, dengan adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak baik di dalam maupun di luar perusahaan (Solihin, 2009).

RUPS atau pemegang saham, Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan merupakan organ-organ perusahaan yang memegang peranan kunci pelaksanaan GCG.

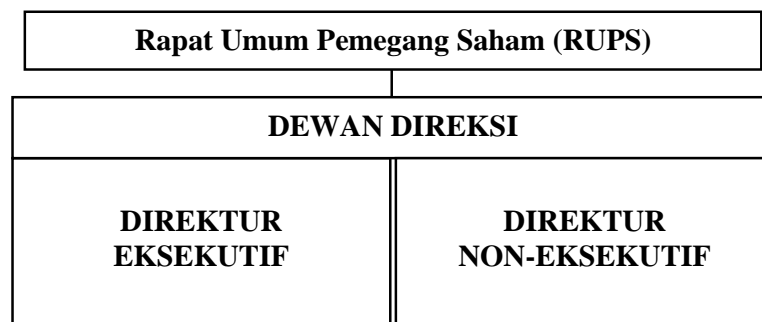
2.3.2 Dewan Komisaris

Terdapat dua sistem Manajemen yang berbeda yang berasal dari dua sistem hukum yang berbeda (FCGI,2002) yang membedakan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh dewan Komisaris yaitu:

1) Sistem Satu Tingkat atau *One Tier System*.

Sistem Satu Tingkat berasal dari Sistem Hukum Anglo Saxon. Dalam sistem ini perusahaan hanya mempunyai satu Dewan Direksi yang pada umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (Direktur Eksekutif) dan Direktur Independen yang bekerja dengan prinsip paruh waktu (Non Direktur Eksekutif). Negara-negara yang menggunakan *One Tier System* misalnya adalah Amerika Serikat dan Inggris.

Gambar 2.1
Struktur *Board of Director* dalam *One Tier System*

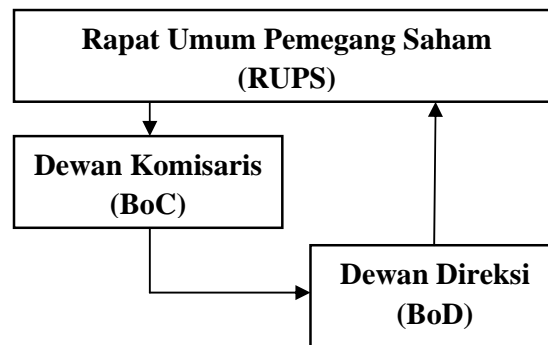


Sumber: FCGI (2002)

2) Sistem Dua Tingkat atau *Two Tiers System*.

Sistem Dua Tingkat berasal dari Sistem Hukum Kontinental Eropa. Dalam sistem ini perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu Dewan Pengawas (Dewan Komisaris) dan Dewan Manajemen (Dewan Direksi). Dewan Direksi bertugas mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dan pengawasan Dewan Komisaris. Dewan Direksi juga harus memberikan informasi kepada Dewan Komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh Dewan Komisaris. Sehingga Dewan Komisaris terutama bertanggungjawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen. Negara-negara yang menggunakan *Two Tiers System* adalah Denmark, Jerman, Belanda, Jepang termasuk juga Indonesia.

Gambar 2.2
Struktur *BoD* dan *BoC* dalam *TwoTiers System* yang berkembang di Indonesia



Sumber: FCGI (2002)

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG sesuai dengan aturan. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta

dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris (KNKG,2006). Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

- 1) Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- 2) Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
- 3) Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 97, dijelaskan bahwa Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Lebih lanjut Pasal 98 UUPT menegaskan, bahwa Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, pada pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan Terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota Dewan Komisaris. Oleh karena itu, jumlah anggota Dewan Komisaris dalam tiap

perusahaan berbeda-beda jumlahnya karena harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Dewan Komisaris terdiri dari komisaris independen dan komisaris non-independen. Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi, sedangkan komisaris non-independen merupakan komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi (KNKG,2006).

Keberadaan Komisaris Independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000 dikutip dari (FCGI,2002). Dikemukakan bahwa perusahaan yang listed di Bursa harus mempunyai Komisaris Independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas (*bukan controlling shareholders*). Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Beberapa kriteria lainnya tentang Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

- 1) Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;

- 2) Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;
- 3) Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;
- 4) Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- 5) Komisaris Independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (*bukan controlling shareholders*) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2.3.3 Komite Audit

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite yang dapat membantu pelaksanaan tugasnya. Salah satunya adalah Komite Audit, yang memiliki tugas terpisah dalam membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh (FCGI, 2002). Pada umumnya, Komite Audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

1. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*), adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang Kondisi keuangan, Hasil Usahanya, serta Rencana dan komitmen jangka panjang;
2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*), adalah untuk memastikan, bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang

dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*). Tanggung jawab Komite Audit untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup audit internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektifitas sistem pengawasan intern.

Dalam Pedoman GCG Indonesia (KNKG, 2006) dijelaskan bahwa, Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Menurut Surat Edaran Bapepam Nomor: SE-03/PM/2000 menyatakan bahwa tujuan Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris untuk:

- a) Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan;
- b) Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan;
- c) Meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit;

d) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Selain itu, menurut KNKG (2006) Jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan.

Komite Audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, dan memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Salah satu dari beberapa alasan utama kemandirian ini adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh Komite Audit, karena individu yang mandiri cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan (FCGI,2002). Komite Audit akan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Dengan demikian, apabila fungsi dan tanggung jawab Komite Audit dapat dilaksanakan dengan baik, maka hal ini akan mendorong terwujudnya prinsip-prinsip GCG yang akan mendorong perusahaan untuk selalu bertanggung jawab kepada kepentingan seluruh *stakeholders*.

2.3.2 Perkembangan GCG di Indonesia

Terdapat beberapa alasan yang mendorong munculnya GCG sehingga menarik perhatian dunia dan mendorong desakan untuk mengimplementasikan GCG (Becht *et.al.*, 2002) dalam Solihin, 2009) antara lain: (1) Munculnya gelombang privatisasi di Seluruh dunia; (2) Terjadinya reformasi dana pensiun; (3) Adanya merger dan pengambilalihan perusahaan; (4) Adanya deregulasi dan integrasi pasar modal; (5) Krisis ekonomi Asia Timur, Rusia, dan Brasil; (6) Berbagai skandal yang menimpa perusahaan besar.

Perkembangan GCG di Indonesia terpengaruh oleh kejadian-kejadian tersebut di atas, karena Indonesia merupakan bagian dari perekonomian dunia. Krisis ekonomi di Asia Timur merupakan faktor utama terjadinya krisis di Indonesia. Kajian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) dikutip dari Kaihatu, (2006) menunjukkan beberapa faktor yang memberi kontribusi pada krisis di Indonesia. Pertama, konsentrasi kepemilikan perusahaan yang tinggi; kedua, tidak efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris, ketiga; inefisiensi dan rendahnya transparansi mengenai prosedur pengendalian merger dan akuisisi perusahaan; keempat, terlalu tingginya ketergantungan pada pendanaan eksternal; dan kelima, ketidak memadainya pengawasan oleh para kreditor.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan sebuah sistem tata kelola perusahaan yang baik. Dalam penerapan GCG di Indonesia, seluruh pemangku kepentingan dari sektor swasta turut berpartisipasi bersama pemerintah dan lembaga-lembaga independen berhasil membentuk suatu sistem untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik agar Indonesia terbebas dari krisis

(Kaihatu, 2006). Pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 telah mengeluarkan Pedoman Good Corporate Governance (GCG) yang pertama. Pedoman tersebut telah beberapa kali disempurnakan, terakhir pada tahun 2001. Saat ini KNKCG telah diganti dengan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) melalui Surat Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004.

Selain itu, penerapan GCG didukung juga oleh sektor swasta melalui mekanisme pasar modal seperti PT. BEI dan Bapepam-LK mengeluarkan regulasi-regulasi guna mendukung implementasi GCG di Indonesia (Taridi, 2009):

- a) Pada tahun 2000, Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) memberlakukan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-315/BEJ/06/2000 perihal Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A yang antara lain mengatur tentang kewajiban mempunyai Komisaris Independen, Komite Audit, memberikan peran aktif Sekretaris Perusahaan di dalam memenuhi kewajiban keterbukaan informasi serta mewajibkan perusahaan tercatat untuk menyampaikan informasi yang material dan relevan.
- b) Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-63/PM/1996 yang kemudian dijelaskan dalam Peraturan Nomor IX.I.4 tentang pembentukan sekretaris perusahaan.

- c) Surat Edaran Ketua Bapepam-LK Nomor SE-03/PM/2000 tentang Komite Audit yang berisi himbauan perlunya Komite Audit dimiliki oleh setiap Emiten.
- d) Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-40/PM/2003 yang dijelaskan dalam peraturan Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung jawab direksi atas laporan keuangan.
- e) Surat Edaran Ketua Bapepam-LK Nomor SE-07/PM/2004 yang dijelaskan dalam peraturan Nomor IX.I.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit.
- f) Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-45/PM/2004 yang dijelaskan dalam peraturan Nomor IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris pada emiten dan perusahaan publik.
- g) Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-134/BL/2006 yang dijelaskan dalam peraturan Nomor X.K.6 tentang kewajiban penyampaian Laporan Tahunan bagi emiten dan perusahaan publik.

Selain dengan peraturan-peraturan tersebut, implemenasi GCG di Indonesia didukung dengan munculnya organisasi-organisasi independen pendukung seperti *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*, *Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*, *Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)*. Dengan adanya lembaga-lembaga independen tersebut, maka implementasi GCG di Indonesia diharapkan semakin berkembang diikuti dengan kesadaran karena manfaat yang diperoleh oleh perusahaan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan di Indonesia berkaitan dengan CSR antara lain oleh Sembiring (2005) berusaha meneliti beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR pada perusahaan di Indonesia. Variabel independen yang digunakan yaitu ukuran perusahaan, profil perusahaan, ukuran dewan komisaris, profitabilitas, dan leverage perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah berhasil membuktikan bahwa ukuran perusahaan, profil perusahaan, dan ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan di Indonesia.

Anggraini (2006) mengamati tingkat pengungkapan CSR dan menguji faktor-faktor penentu yang digunakan perusahaan sebagai pertimbangan untuk mengungkapkan CSR. Penelitian ini menggunakan kategori pelaporan kelestarian perusahaan (*corporate sustainability reporting*) dari Darwin (2004), antara lain kinerja lingkungan, kinerja ekonomi, dan kinerja sosial dengan mengambil data penelitian dari semua sektor perusahaan yang listing di BEI tahun 2000-2004. Penelitian ini menggunakan lima variabel yang dapat dipertimbangkan, yaitu faktor kepemilikan manajemen, hutang, ukuran, tipe perusahaan, dan profitabilitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajemen dan jenis industri menjadi bahan pertimbangan oleh perusahaan untuk mengungkapkan CSR.

Rosmasita (2007) berusaha mempersempit objek dari penelitian sebelumnya dengan melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR suatu perusahaan dalam hal ini hanya pada

perusahaan manufaktur. Faktor-faktor tersebut diproksikan dalam kepemilikan manajemen, *leverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Sampel yang digunakan adalah 113 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2004-2005. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain: (1) pengujian secara simultan menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara faktor-faktor perusahaan terhadap pengungkapan CSR perusahaan, (2) variabel kepemilikan manajemen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan sosial.

Amran dan Devi (2008) mencoba menyelidiki mengenai pengaruh pemerintah dan afiliasi dengan pihak asing, terutama perusahaan multinasional, dengan perkembangan *corporate social reporting* (CSR) dalam ekonomi. Amran dan Devi melakukan studi *content analysis* pada laporan tahunan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Malaysia pada periode 2002/2003. Namun penelitian ini hanya meneliti pengaruh kepemilikan dari segi pengaruh pemerintah dan afiliasi asing terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini mengungkapkan kebenaran bahwa pemerintah berpengaruh terhadap perkembangan CSR di Malaysia, sedangkan afiliasi dengan pihak asing tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan CSR di Malaysia.

Machmud dan Djakman (2008) mengadakan penelitian untuk menyelidiki pengaruh kepemilikan asing dan kepemilikan institutional sebagai pertimbangan perusahaan dalam pengungkapan CSR pada laporan tahunan 2006. Sampel penelitian ini terdiri dari 107 perusahaan yang terdaftar pada BEI tahun 2006. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak memiliki

pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, dan kepemilikan institutional juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2009) menggunakan populasi penelitian perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2006 dan 2007 dengan total sampel 86 perusahaan. Penelitian tersebut berusaha menganalisis faktor karakteristik perusahaan yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada laporan tahunan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor kepemilikan saham asing, kepemilikan saham publik, ukuran industri dan tipe industri berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR di Indonesia, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Said *et.al.* (2009), berusaha meneliti hubungan antara CSR dan karakteristik *Corporate Governance* pada perusahaan yang *listed* di Bursa Malaysia. Said *et. al.* menggunakan karakteristik *corporate governance* yaitu *board size, independen non-executive director, CEO duality, audit committee, ownership concentration, managerial ownership, foreign ownership, dan government shareholding*. Penelitian ini menggunakan dasar analisis regresi dan berhasil menemukan hanya dua variabel yang berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di Malaysia yaitu kepemilikan saham oleh pemerintah (*government Shareholding*) dan komite audit.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Tujuan	Metode Analisis	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Sembiring (2005)	Meneliti beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR pada Perusahaan di Indonesia	Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Independen: Size, profitabilitas, Profile perusahaan, ukuran dewan komisaris dan leverage • Dependen: CSR Disclosure 	Ukuran perusahaan, profil perusahaan dan Ukuran Dewa Komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap luas pengungkapan CSR, sedangkan variabel profitabilitas dan leverage tidak menunjukkan hubungannya dengan pengungkapan CSR.
2.	Anggraini (2006)	Meneliti luas pengungkapan CSR dan faktor-faktor yang mempengaruhinya	Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Independen : kepemilikan manajemen, leverage, ukuran perusahaan, tipe industri, profitabilitas • Dependen : CSR disclosure 	Hasil penelitian Anggraini menunjukkan bahwa hampir semua perusahaan mengungkapkan kinerja ekonomi. Kepemilikan manajemen dan tipe industri menjadi bahan pertimbangan untuk mengungkapkan CSR.
3.	Rosmasita (2007)	Mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sosial suatu perusahaan.	Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Independen : kepemilikan manajemen, tingkat <i>leverage</i>, ukuran perusahaan, dan profitabilitas • Dependen : pngungkapan sosial 	(1) Pengujian secara simultan menemukan adanya peneruh yang signifikan antara faktor-faktor perusahaan terhadap pengungkapan CSR perusahaan, (2) variabel kepemilikan manajemen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan sosial
4.	Amran dan Devi (2008)	Menginvestigasi pengaruh pemerintah dan afiliasi asing terhadap pengungkapan	Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Independen : foreign shareholders, government shareholding, dependence 	Pemerintah berpengaruh terhadap perkembangan CSR di Malaysia, sedangkan afiliasi dengan pihak asing tidak menunjukkan pengaruh

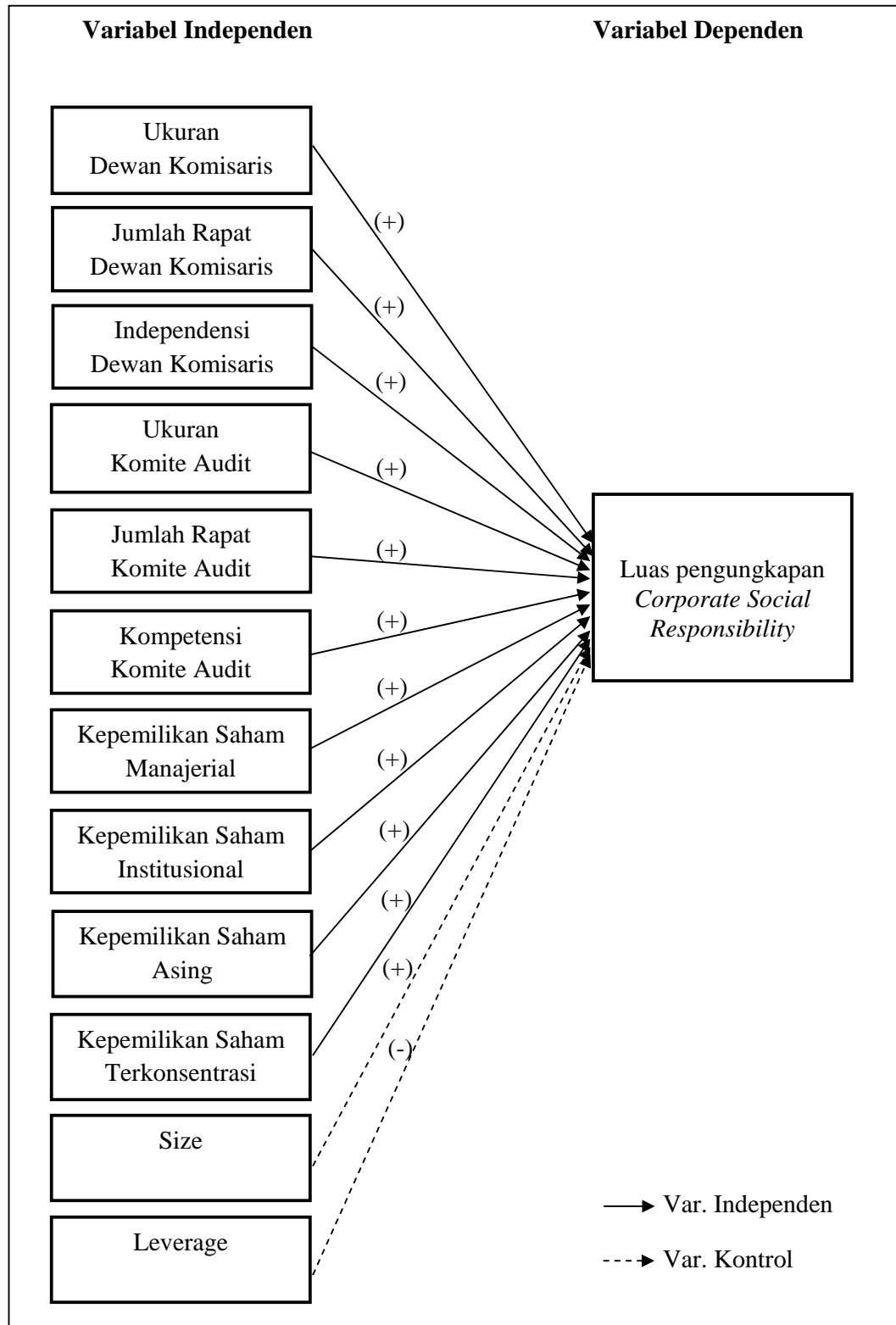
		CSR pada perusahaan publik Malaysia		<p>on government, dependence on foreign partner, industry, size, profitability</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dependen : CSR 	yang signifikan terhadap perkembangan CSR di Malaysia
5.	Machmud dan Djakman (2008)	Meneliti kepemilikan asing dan institusional yang dianggap berpengaruh terhadap pengungkapan CSR	Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Independen : kepemilikan asing, kepemilikan institusional • Dependen: pengungkapan CSR 	Kedua struktur kepemilikan (asing dan institusional) tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di Indonesia
6.	Puspitasari (2009)	Meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR pada laporan tahunan	Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Independen : kepemilikan asing, kepemilikan saham publik, ukuran industri, tipe industri, profitabilitas • Dependen : CSR disclosure 	Hasil penemuan menyebutkan bahwa Faktor kepemilikan saham asing, kepemilikan saham publik, ukuran industri dan tipe industry berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR di Indonesia, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR di Indonesia.
7.	Said <i>et al</i> (2009)	Meneliti hubungan karakteristik corporate governance dengan pengungkapan CSR.	Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Independen : board size, board independence, duality, audit committee, managerial, foreign, government ownership • Dependen: CSR disclosure 	Government ownership dan audit committee berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan publik di Malaysia

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka serta beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti mengindikasikan faktor *good corporate governance* dalam hal ini dilihat dari Ukuran Dewan Komisaris, Jumlah rapat Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Jumlah rapat Komite Audit, Kompetensi Komite Audit, Kepemilikan saham manajerial, Kepemilikan saham institusional, Kepemilikan saham Asing, dan Kepemilikan saham terkonsentrasi sebagai variabel independen penelitian serta Ukuran dan Leverage perusahaan sebagai variabel kontrol yang mempengaruhi luas pengungkapan CSR.

Untuk membantu dalam memahami dinamika struktur kepemilikan saham yang mempengaruhi luas pengungkapan CSR diperlukan suatu kerangka pemikiran. Dari landasan teori yang telah diuraikan di atas, disusun hipotesis yang merupakan alur pikiran dari peneliti, kemudian digambarkan dalam kerangka teoritis yang disusun sebagai berikut:

Gambar 2.3
Skema Kerangka Pemikiran



2.6 Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Hubungan Ukuran Dewan Komisaris dengan Pengungkapan CSR

Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan atau pihak manajemen. Dalam hal ini, manajemen bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen (FCGI, 2002).

Berdasarkan teori agensi, Dewan Komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen. Melalui peran monitoring oleh Dewan Komisaris, perusahaan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat terjamin kelangsungannya (Sulastini, 2007). Dengan demikian, dikaitkan dengan pengungkapan informasi oleh perusahaan, semakin besar ukuran Dewan Komisaris, maka komposisi pengalaman dan keahlian (*experience and expertise*) yang dimiliki oleh Dewan Komisaris semakin meningkat, sehingga dapat melakukan aktivitas monitoring dengan lebih baik (Akhtaruddin, *et. al.*, 2009). Dengan proses monitoring yang baik, maka diharapkan pengungkapan informasi sosial (CSR) semakin luas, dikarenakan kemungkinan manajer untuk menyembunyikan informasi dapat dikurangi.

Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara ukuran Dewan Komisaris dengan tingkat pengungkapan informasi sosial oleh perusahaan. Hasil penelitian Sembiring (2005) dan Sulastini (2007) menemukan adanya hubungan positif yang signifikan antara ukuran Dewan Komisaris dengan

pengungkapan CSR di Indonesia. Hal ini berarti bahwa semakin banyak jumlah anggota Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan, maka monitoring akan berjalan dengan baik dan pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuat perusahaan akan semakin luas. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti sebagai berikut:

H1 = Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR

2.6.2 Hubungan Jumlah Rapat Dewan Komisaris dengan Pengungkapan CSR

Menurut Egon Zehnder dikutip dalam Booklet FCGI (2002) menyatakan bahwa, Dewan Komisaris merupakan inti dari *Corporate Governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dalam rangka menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris mengadakan rapat-rapat rutin untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Dewan Direksi dan implementasinya.

Rapat Dewan Komisaris merupakan suatu proses yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam pengambilan suatu keputusan mengenai kebijakan perusahaan. Dalam Rapat Dewan Komisaris (*board process*) terdapat beberapa suara yang akan diambil menjadi satu keputusan bulat dengan musyawarah mufakat. Proses pengambilan keputusan ini merupakan hal yang penting dalam menentukan efektivitas Dewan Komisaris dalam melakukan mekanisme

pengawasan dan pengendalian (Muntoro, 2006). Rapat Dewan Komisaris merupakan media komunikasi dan koordinasi diantara anggota-anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas menejemen. Dalam rapat tersebut akan membahas masalah mengenai arah dan strategi perusahaan, evaluasi kebijakan yang telah diambil atau dilakukan oleh manajemen, mengatasi masalah benturan kepentingan (FCGI, 2002). Oleh karena itu, dengan semakin sering Dewan Komisaris mengadakan pertemuan, diharapkan mekanisme pengawasan perusahaan dapat dilakukan dengan baik.

Penelitian Xie *et.al* (2003) dalam Widowati (2009) menemukan bahwa semakin sering Dewan Komisaris bertemu atau mengadakan rapat, maka akrual kelolaan perusahaan semakin kecil. Hal ini berarti Semakin sering Dewan Komisaris mengadakan rapat maka fungsi pengawasan terhadap manajemen menjadi semakin efektif. Dengan demikian diharapkan dengan semakin efektifnya fungsi pengawasan, maka pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan juga akan semakin luas. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 = Jumlah rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR

2.6.3 Hubungan Independensi Dewan Komisaris dengan Pengungkapan CSR

Keberadaan Komisaris Independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. Dikemukakan bahwa perusahaan yang

terdaftar di BEJ harus mempunyai Komisaris Independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas (*bukan controlling shareholders*). Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Penelitian Agrawal dan Knoeber (1996); Baysinger dan Butler (1985) dalam Rahman dan Ali (2006) menemukan bahwa dengan adanya Dewan Komisaris Independen, pengelolaan perusahaan lebih efektif dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Apabila jumlah Komisaris Independen semakin besar atau dominan, hal ini dapat memberikan *power* kepada Dewan Komisaris untuk menekan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan (Haniffa dan Cooke, 2002).

Komisaris Independen diperlukan untuk meningkatkan independensi Dewan Komisaris terhadap kepentingan pemegang saham (mayoritas) dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya (Muntoro, 2006). Dengan demikian, semakin besar komposisi Independensi Dewan Komisaris, maka kemampuan Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan dalam rangka melindungi seluruh pemangku kepentingan dan mengutamakan perusahaan semakin objektif. Dengan kata lain, semakin besar komposisi Komisaris Independen, maka Dewan Komisaris dapat bertindak semakin objektif dan mampu melindungi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian hal ini mendorong pengungkapan CSR secara lebih luas.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3 = Independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR

2.6.4 Hubungan Ukuran Komite Audit dengan Pengungkapan CSR

Dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 yang termuat dalam peraturan Nomor IX.I.5 disebutkan bahwa Komite Audit yang dimiliki oleh perusahaan minimal terdiri dari tiga orang, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang berasal dari Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.

Keberadaan Komite Audit dapat mempengaruhi pengungkapan yang dilakukan perusahaan secara signifikan (Ho dan Wong, 2001 dalam Akhtaruddin *et.al.*, 2009). Komite Audit merupakan komite yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan mekanisme pengawasan terhadap manajemen. Menurut Forker (1992) dalam Said *et. al.* (2009), Komite Audit dianggap sebagai alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan.

Collier (1993) dalam Nasir dan Abdulllah (2004) menyatakan bahwa keberadaan Komite Audit membantu menjamin pengungkapan dan sistem pengendalian akan berjalan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan dengan ukuran Komite Audit yang semakin besar, maka pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan kualitas pengungkapan informasi sosial yang dilakukan perusahaan semakin meningkat atau semakin luas. Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H4 = Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR

2.6.5 Hubungan Jumlah Rapat Komite Audit dengan Pengungkapan CSR

Berdasarkan keputusan ketua Bapepam Nomor Kep-24/PM/2004 dalam peraturan Nomor IX.I.5 disebutkan bahwa Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran dasar perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya Komite Audit melakukan rapat atau pertemuan untuk melakukan koordinasi agar dapat menjalankan tugas secara efektif dalam hal pengawasan laporan keuangan, pengendalian internal, dan pelaksanaan GCG perusahaan. Dengan semakin sering mengadakan pertemuan, maka diharapkan koordinasi Komite Audit semakin baik dan dapat menjalankan tugasnya secara efektif.

Penelitian Putri (2009) yang menemukan adanya hubungan antara jumlah pertemuan Komite Audit yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi laba perusahaan. Hal ini berarti, semakin sering komite audit

mengadakan pertemuan maka pengungkapan informasi laba perusahaan semakin transparan. Dengan demikian, dengan lebih seringnya terjadi rapat atau pertemuan komite audit maka dapat menambah keefektifan pengawasan manajemen, penerapan prinsip-prinsip GCG oleh perusahaan dan dapat mendukung peningkatan pengungkapan CSR. Berdasarkan asumsi tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H5 = Jumlah rapat Komite Audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR

2.6.6 Hubungan Kompetensi Komite Audit dengan Pengungkapan CSR

Dalam menjalankan perannya membantu Dewan Komisaris melakukan mekanisme pengawasan laporan keuangan, pengendalian internal, pelaksanaan GCG, maka anggota Komite Audit harus mempunyai kompetensi di bidang keuangan dan atau akuntansi (*financial literacy*). Komite Audit berperan sebagai alat untuk *me-rivew* perusahaan dalam proses pengungkapan data keuangan dan proses pengendalian internal. Dengan demikian, keberadaan Komite Audit dengan kompetensi yang dimilikinya akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Menurut Forker (1992) dalam Said *et. al.* (2009), dalam keberadaan Komite Audit dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan pengendalian internal sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaporan. Penelitian Felo *et. al.* (2003) dalam Rahman dan Ali (2006) menemukan bahwa persentase anggota Komite Audit yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang akuntansi atau

keuangan berhubungan positif dengan kualitas pelaporan keuangan. Komite audit yang memiliki pengetahuan dan keahlian terkait proses penyusunan laporan keuangan dan audit internal sangat mungkin membatasi tindakan oportunistik yang dilakukan pihak manajemen. Hal ini berarti Komite Audit dapat mempengaruhi kualitas pelaporan perusahaan, termasuk laporan pengungkapan CSR-nya. Berdasarkan asumsi tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H6 = Kompetensi Komite Audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR

2.6.7 Hubungan Kepemilikan Saham Manajerial dengan Pengungkapan CSR

Dalam mekanisme pelaksanaan GCG, kepemilikan manajerial digunakan sebagai suatu upaya untuk mengurangi konflik agensi atau konflik kepentingan antara manajer dan pemilik (Said *et. al.*, 2009). Dengan kepemilikan manajerial, maka manajemen akan secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan. Semakin besar kepemilikan manajerial di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah.

Selain itu, dengan Kepemilikan manajerial maka tindakan oportunistik manajer untuk memaksimalkan kepentingan pribadi akan berkurang. Manajer perusahaan akan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan yaitu dengan cara mengungkapkan informasi sosial yang seluas-luasnya dalam

rangka untuk meningkatkan *image* perusahaan, meskipun manajer harus melakukan pengorbanan sumber dayanya untuk melakukan aktivitas tersebut (Gray, *et al.* 1988 dalam Anggraini, 2006).

Penelitian Nasir dan Abdullah (2004) yang menunjukkan hasil signifikan positif dalam hubungan antara kepemilikan saham manajerial berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR. Konsisten dengan hal itu, penelitian oleh Anggraini (2006) dan Rosmasita (2007) menemukan bahwa kepemilikan saham manajerial berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di Indonesia. Berdasarkan asumsi tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H7 = Kepemilikan saham manajerial berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR

2.6.8 Hubungan Kepemilikan Saham Institusional dengan Pengungkapan CSR

Menurut Mursalim (2007) kepemilikan institusional dapat dijadikan upaya mengurangi masalah agensi melalui proses monitoring. Bathala, *et.al* (1994) dalam Mursalim (2007) menyatakan bahwa investor institusional merupakan pengawas dalam pasar modal, karena memiliki saham perusahaan cukup besar. Disamping itu, pemegang saham institusional memiliki *opportunity*, *resources* dan *expertise* menganalisis kinerja dan tindakan manajemen (Chung, Firth dan Kim, 2005 dalam Mursalim, 2007). Investor institusional sebagai pemilik sangat berkepentingan untuk membangun reputasi perusahaan.

Menurut Machmud dan Djakman (2008), perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar akan lebih mampu untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen. Menurut Herawaty (2008), Investor institusional yang sering disebut sebagai investor yang canggih (*sophisticated*) sehingga tidak mudah untuk dicurangi manajer. Hal ini berarti dengan jumlah kepemilikan yang cukup signifikan akan dapat memonitor manajemen sehingga dapat mengurangi masalah keagenan tersebut.

Penelitian Trabelsi *et.al.* (2005) dan Ajinkya *et. al.* (2005) dalam Matoussi dan Chakroun (2008), menemukan bahwa kepemilikan Institusional dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan sukarela. Menurut Summa dan Ben Ali (2006) dalam Matoussi dan Chakroun (2008), Investor institusional memiliki *power dan experience* untuk bertanggung jawab dalam menerapkan prinsip *corporate governance* untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang saham, sehingga mereka menuntut perusahaan untuk melakukan komunikasi secara transparan. Hal ini berarti, dengan kepemilikan institusional yang besar dapat mendorong meningkatkan luas pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan asumsi tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H8 = Kepemilikan saham institusional berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR

2.6.9 Hubungan Kepemilikan Saham Asing dengan Pengungkapan CSR

Perusahaan dengan kepemilikan saham asing biasanya lebih sering menghadapi masalah asimetri informasi dikarenakan alasan hambatan geografis dan bahasa (*space and language*). Oleh karena itu, perusahaan dengan kepemilikan saham asing yang besar akan terdorong untuk melaporkan atau mengungkapkan informasinya secara sukarela dan lebih luas (Xiao *et al.*, 2004 dalam Huafang dan Jianguo, 2007).

Selain itu, perusahaan yang memiliki kontrak dengan investor asing diduga akan lebih *concern* terhadap praktik dan pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR). Menurut Susanto (1992) dalam Puspitasari (2009), perusahaan yang memiliki kepemilikan saham asing cenderung memberikan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan yang tidak, dikarenakan beberapa alasan antara lain: Pertama, perusahaan asing terutama dari Eropa dan Amerika lebih lama mengenal konsep praktik dan pengungkapan CSR. Kedua adalah perusahaan asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik dalam bidang akuntansi dari perusahaan induk di luar negeri. Ketiga, perusahaan tersebut mungkin mempunyai sistem informasi yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal dan kebutuhan perusahaan induk. Keempat, kemungkinan permintaan yang lebih besar pada perusahaan berbasis asing dari pelanggan, pemasok dan masyarakat umum.

Penelitian Tanimoto dan Suzuki (2005) dalam Machmud dan Djakman (2008) dalam melihat luas adopsi GRI (*Global Reporting Initiative*) dalam laporan tanggung jawab sosial pada perusahaan publik di Jepang, membuktikan bahwa kepemilikan saham asing pada perusahaan publik di Jepang menjadi faktor

pendorong terhadap adopsi GRI dalam pengungkapan CSR. Penelitian lain yang dilakukan Abdul Samad (2002) dan Haniffa dan Cooke (2005) dalam Said *et.al* (2009) juga menemukan hasil yang signifikan antara pengaruh kepemilikan saham asing (*foreign ownership*) dengan pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H9 = Kepemilikan saham asing berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR

2.6.10 Hubungan Kepemilikan Saham Terkonsentrasi dengan Pengungkapan CSR

Struktur kepemilikan saham mencerminkan distribusi kekuasaan dan pengaruh di antara pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan. Salah satu karakteristik struktur kepemilikan adalah konsentrasi kepemilikan yang terbagi dalam dua bentuk struktur kepemilikan: kepemilikan terkonsentrasi, dan kepemilikan menyebar (Nuryaman, 2008). Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi jika sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan dengan lainnya.

Menurut Yu dan Shao (2007) struktur kepemilikan yang terkonsentrasi merupakan cara efektif untuk menurunkan biaya agensi dan melakukan proses monitoring dengan baik. Dengan kepemilikan saham yang terkonsentrasi, maka pemegang saham dapat mengimbangi informasi yang dimiliki oleh manajer, dengan kata lain proses monitoring dari pihak pemegang saham terhadap

manajemen dapat berjalan dengan baik dan tindakan oportunistis manajemen untuk menyembunyikan informasi akan berkurang. Dengan demikian dapat mendorong pengungkapan CSR untuk dilakukan dengan lebih luas. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H10 = Kepemilikan saham terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR

2.6.11 Hubungan Ukuran Perusahaan (Size) dengan Pengungkapan CSR

Ukuran perusahaan (*firm's size*) merupakan variabel yang banyak digunakan untuk menjelaskan pengungkapan pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunan. Belkaoui dan Karpik (1989), Hackston dan Milne (1996), Sembiring (2005), Rosmasita (2007), Machmud dan Djakman (2008), dan Puspitasari (2009) menemukan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial. Dalam kerangka teori agensi, apabila ukuran perusahaan lebih besar, maka biaya keagenan yang dikeluarkan juga lebih besar, sehingga untuk mengurangi biaya keagenan tersebut, perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas. Di samping itu, perusahaan yang lebih besar akan mendapat sorotan yang lebih banyak dari masyarakat. Oleh karena itu, pengungkapan yang lebih besar merupakan cara untuk mengurangi biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan (Sembiring, 2005).

Menurut Cowen *et. al.*, (1987) dalam Sembiring (2005), secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan. Perusahaan yang lebih besar mempunyai aktivitas operasi yang lebih banyak dan memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat, serta mungkin akan memiliki pemegang saham yang lebih banyak yang akan selalu memperhatikan program sosial yang dibuat perusahaan sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin luas. Berdasarkan asumsi tersebut diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H11 = Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR

2.6.12 Hubungan Rasio Leverage Perusahaan dengan Pengungkapan CSR

Rasio *leverage* perusahaan menggambarkan berapa kelebihan kewenangan yang dimiliki oleh *debtholders* dibandingkan dengan kewenangan *shareholders*. Ketergantungan perusahaan terhadap hutang dalam membiayai kegiatan operasinya tercermin dalam tingkat *leverage*. Dengan demikian, *Leverage* ini juga mencerminkan tingkat resiko keuangan perusahaan. Berdasarkan teori agensi, tingkat *leverage* mempunyai pengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (Sembiring, 2005). Menurut Belkaoui & Karpik (1989), semakin tinggi tingkat *leverage* (rasio utang/ekuitas) semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit, sehingga perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi yang dapat dilakukan dengan cara mengurangi biaya-biaya, termasuk biaya untuk mengungkapkan informasi sosial.

Hasil penelitian Belkaoui & Karpik (1989) dan Waryanti (2009) menemukan bahwa faktor tingkat *leverage* perusahaan berpengaruh secara negatif terhadap luas pengungkapan sosial perusahaan. Belkaoui dan Karpik (1989) menjelaskan bahwa keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial akan mengikuti suatu pengeluaran untuk pengungkapan yang menurunkan pendapatan. Sesuai dengan teori agensi maka manajemen perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari para *debtholder*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H12 = Rasio Leverage perusahaan berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan CSR

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan CSR pada Laporan Tahunan perusahaan yang dinyatakan dalam *Corporate Social Responsibility Index* (CSRI) yang akan dinilai dengan membandingkan jumlah pengungkapan yang dilakukan perusahaan dengan jumlah pengungkapan yang disyaratkan dalam GRI meliputi 79 item pengungkapan : *economic, environment, labour practices, human rights, society, dan product responsibility*. Apabila item informasi yang ditentukan diungkapkan dalam laporan tahunan maka diberi skor 1, dan jika item informasi tidak diungkapkan dalam laporan tahunan maka diberi skor 0. Perhitungan Indeks Luas Pengungkapan CSR (CSRI) dirumuskan sebagai berikut:

$$CSRI_t = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{79} \quad (3.1)$$

Pengukuran indeks pengungkapan CSR dilakukan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu suatu metode pengkodifikasian teks dengan ciri-ciri yang sama ditulis dalam berbagai kelompok atau kategori berdasar pada kinerja yang ditentukan (Weber, 1988 dalam Sembiring, 2005). Pengukuran luas pengungkapan CSR dalam penelitian ini dilakukan secara *non repeated* artinya hanya menghitung satu kali untuk tiap item tanpa mempertimbangkan item

tersebut diungkapkan lagi dalam halaman atau bagian lain dengan bahasa yang berbeda. Selain itu, pengukuran dilakukan dengan melihat item-item pengungkapan yang termuat dalam laporan tahunan saja tanpa melihat dan mengukur kembali luas pengungkapan yang dicantumkan dalam laporan yang khusus seperti *sustainability report*, dikarenakan tidak semua perusahaan menerbitkan *sustainability report* tersebut.

3.1.2 Variabel Bebas (Independen)

3.1.2.1 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran Dewan Komisaris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan. Ukuran Dewan Komisaris dihitung dengan menghitung jumlah anggota Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan yang disebutkan dalam laporan tahunan.

3.1.2.2 Jumlah rapat Dewan Komisaris

Jumlah rapat Dewan Komisaris merupakan jumlah pertemuan atau rapat internal yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam waktu satu tahun. Jumlah rapat Dewan Komisaris diukur dengan cara melihat jumlah rapat yang dilakukan Dewan Komisaris pada laporan tahunan perusahaan yang tercantum pada laporan tata kelola perusahaan.

3.1.2.3 Independensi Dewan Komisaris

Komisaris independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi. Independensi Dewan Komisaris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proporsi Komisaris Independen dalam suatu Dewan

Komisaris perusahaan. Independensi Dewan Komisaris diukur dengan rasio atau (%) antara jumlah anggota Komisaris Independen dibandingkan dengan jumlah total anggota Dewan Komisaris.

3.1.2.4 Ukuran Komite Audit

Ukuran Komite Audit merupakan jumlah anggota Komite Audit dalam suatu perusahaan. Ukuran Komite Audit dihitung dengan menghitung jumlah anggota Komite Audit dalam laporan tahunan perusahaan yang tercantum pada laporan tata kelola perusahaan.

3.1.2.5 Jumlah rapat Komite Audit

Jumlah rapat Komite Audit merupakan jumlah pertemuan atau rapat yang dilakukan oleh Komite Audit dalam waktu satu tahun. Jumlah rapat Komite Audit diukur dengan cara melihat jumlah rapat yang dilakukan Komite Audit pada laporan tahunan perusahaan yang tercantum pada laporan tata kelola perusahaan maupun laporan Komite Audit.

3.1.2.6 Kompetensi Komite Audit

Kompetensi Komite Audit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kompetensi dalam bidang akuntansi atau keuangan (*financial literacy*). Kompetensi ini harus dimiliki oleh anggota Komite Audit dalam suatu perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Variabel ini diukur dengan cara menghitung jumlah anggota Komite Audit yang mempunyai latar belakang dan keahlian dalam bidang akuntansi dan atau keuangan.

3.1.2.7 Kepemilikan Saham Manajerial

Kepemilikan Saham Manajerial adalah tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Kepemilikan manajerial diukur dengan menghitung persentase (%) jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yaitu manajer, komisaris terafiliasi (diluar komisaris independen), dan direksi dibagi dengan total jumlah lembar saham yang beredar.

3.1.2.8 Kepemilikan Saham Institusional

Kepemilikan Saham Institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor institusional. Investor institusional mencakup bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, perseroan terbatas dan lembaga keuangan lainnya. Kepemilikan Institusional dinyatakan dalam persentase (%) yang diukur dengan cara membandingkan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh investor institusional dibagi dengan total jumlah lembar saham yang beredar.

3.1.2.9 Kepemilikan Saham Asing

Kepemilikan saham asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia. Besarnya saham diukur dari rasio (%) dari jumlah kepemilikan saham yang dimiliki pihak asing terhadap total saham yang beredar. Kepemilikan saham asing dalam penelitian ini menggunakan persentase rasio kepemilikan saham asing.

3.1.2.10 Kepemilikan Saham Terkonsentrasi

Kepemilikan saham terkonsentrasi merupakan kepemilikan saham yang sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok tertentu. Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi apabila dalam perusahaan terdapat pemegang saham pengendali/utama, yaitu kepemilikan saham yang besarnya lebih dari 50% hak suara pada suatu perusahaan. Kepemilikan saham terkonsentrasi diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, yaitu pemberian skor 1 untuk perusahaan yang mempunyai kepemilikan terkonsentrasi dan skor 0 untuk perusahaan yang mempunyai kepemilikan saham menyebar.

3.1.3 Variabel Kontrol

3.1.3.1 Ukuran Perusahaan (*Firm Size*)

Ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aset yang dimiliki oleh perusahaan diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Ukuran perusahaan yang diukur dari total aset akan ditransformasikan dalam bentuk logaritma dengan tujuan untuk menyamakan dengan variabel lain, karena nilai total aset perusahaan relatif lebih besar dibandingkan dengan variabel-variabel lain dalam penelitian ini. Ukuran Perusahaan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{SIZE} = \log (\text{nilai buku total aset}) \quad (3.2)$$

3.1.3.2 Leverage

Leverage yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketergantungan perusahaan terhadap hutang dalam membiayai kegiatan operasinya. Hal ini menggambarkan berapa tingkat kelebihan kewenangan yang dimiliki oleh *debtholders* dibandingkan dengan kewenangan *shareholders*. Rasio *leverage*

diukur dengan membagi total utang dengan jumlah ekuitas perusahaan. *Leverage* perusahaan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{LEV} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Equity}} \times 100\% \quad (3.3)$$

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar (*listed*) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008. Penelitian ini menggunakan data laporan tahunan tahun 2008 dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 dan Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 yang didalamnya memuat kewajiban pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial baru berlaku secara efektif pada akhir tahun 2007. Dengan demikian, peneliti menggunakan laporan tahunan periode 2008 karena pada tahun tersebut perusahaan dianggap telah mampu dan siap untuk melakukan pengungkapan dan pelaporan tanggung jawab sosialnya dibandingkan dengan tahun 2007.

Metode pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode *judgement sampling*, yaitu salah satu bentuk *purposive sampling* dengan mengambil sampel yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan maksud dan tujuan penelitian dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan menerbitkan dan mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) periode 2008 secara lengkap.
2. Laporan tahunan (*annual report*) yang diterbitkan perusahaan memenuhi ketentuan Bapepam-LK.

3. Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

Sampel akan diambil dari total populasi perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2008 adalah 407 perusahaan dari berbagai tipe industri. Sampel akan diambil dari tiap-tiap industri dengan tujuan agar dapat mewakili tipe industri perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yang dapat dilihat dari data statistik BEI.

3.3 Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder berupa laporan tahunan atau *annual report* tersebut diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada (<http://www.idx.co.id>), data base pasar modal pojok BEI Fakultas Ekonomi UNDIP Semarang, dan situs web resmi masing-masing perusahaan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi, yaitu penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran dan pencatatan informasi yang diperlukan pada data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan periode 2008.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik harus dilakukan dalam penelitian ini, untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini dilakukan untuk menghindari

terjadinya estimasi yang bias, mengingat tidak pada semua data dapat diterapkan regresi. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji Normalitas, uji Multikolonieritas, dan Uji Heteroskedastisitas.

3.5.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam uji normalitas ini ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2009). Alat uji yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan analisis grafik histogram dan grafik *normal probability plot* dan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)*.

Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik normal probability plot adalah (Ghozali, 2009):

1. Jika titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika titik menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)* adalah (Ghozali, 2009):

1. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.
2. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih dari 0,05, maka H_0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

3.5.1.2 Uji Multikolinieraritas

Uji multikolinieraritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2009). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieraritas, dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieraritas adalah nilai $Tolerance \leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$.

3.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2009). Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas pada penelitian ini diuji dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan nilai residualnya (SRESID). Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghozali, 2009) :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3.5.2 Analisis Regresi Berganda

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan serangkaian tahap untuk menghitung dan mengolah data tersebut, agar dapat mendukung hipotesis yang telah diajukan.

Adapun tahap-tahap penghitungan dan pengolahan data sebagai berikut:

1. Menghitung karakteristik implementasi GCG perusahaan yang diprosikan dalam Ukuran Dewan Komisaris, Jumlah rapat Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Jumlah Rapat Komite Audit, Kompetensi Komite Audit, Kepemilikan saham manajerial, Kepemilikan saham institusional, Kepemilikan saham asing, dan kepemilikan saham Terkonsentrasi.
2. Menghitung indeks CSR yang diungkapkan perusahaan dalam laporan tahunan dengan membandingkan dengan standar GRI.
3. Mengitung model Regresi.

Metode regresi linier berganda (*multiple regression*) dilakukan terhadap model yang diajukan peneliti dengan menggunakan *Software* SPSS Versi 17.0 untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel

dependen. Hubungan antara karakteristik GCG dengan pengungkapan CSR perusahaan, diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{CSRI}_i = & \beta_0 + \beta_1 \text{UKOM}_i + \beta_2 \text{RAKOM}_i + \beta_3 \text{INKOM}_i + \beta_4 \text{UDIT}_i + \beta_5 \text{RADIT}_i + \\ & \beta_6 \text{KOMDIT}_i + \beta_7 \text{MANJ}_i + \beta_8 \text{INST}_i + \beta_9 \text{ASING}_i + \beta_{10} \text{KONST}_i + \\ & \beta_{11} \text{SIZE}_i + \beta_{12} \text{LEV}_i + \varepsilon_i \end{aligned} \quad (3.4)$$

Keterangan:

CSRI _i	: Indeks pengungkapan CSR perusahaan i
UKOM	: Ukuran (jumlah) Dewan Komisaris
RAKOM	: Jumlah rapat Dewan Komisaris
INKOM	: Proporsi Dewan Komisaris Independen
UDIT	: Ukuran (jumlah) Komite Audit
RADIT	: Jumlah Rapat Komite Audit
KOMDIT	: Kompetensi Komite Audit
MANJ	: Persentase kepemilikan manajerial
INST	: Persentase kepemilikan institusional
ASING	: Persentase kepemilikan asing
KONST	: Konsentrasi kepemilikan saham, <i>terkonsentrasi</i> = 1, <i>menyebar</i> = 0
SIZE	: Ukuran Perusahaan dihitung dengan Log total Aset
LEV	: Rasio Leverage (<i>Debt to Equity Ratio</i>)
ε_i	: <i>error term</i>
<i>I</i>	: 1,2,..., N dimana N adalah banyaknya observasi

3.5.3 Pengujian Hipotesis

Pada dasarnya ada 2 jenis alat uji statistik, yaitu statistik parametrik dan statistik non parametrik. Statistik parametrik digunakan jika distribusi data yang digunakan normal, sedangkan data yang bersifat tidak normal, maka uji statistik yang digunakan adalah statistik non parametrik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengujian statistik parametrik.

Statistik parametrik digunakan apabila peneliti mengetahui fakta yang pasti mengenai sekelompok data yang menjadi sumber sampel (J. Supranto, 2001 dalam Rosmasita, 2006). Menurut Ghozali (2009) ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi agar uji statistik parametrik dapat digunakan, yaitu:

1. Observasi harus independen
2. Populasi asal observasi harus berdistribusi normal.
3. Varians populasi masing-masing grup dalam hal analisis dengan dua grup harus sama.
4. Variabel harus di ukur paling tidak dalam skala interval.

Jika distribusi data bersifat normal, maka digunakanlah uji statistik parametrik. Uji regresi merupakan salah satu jenis uji statistik parametrik, untuk menguji hipotesis yang diajukan peneliti maka akan dilakukan uji pengaruh simultan (F test), uji koefisien determinasi, dan uji pengaruh parsial (t test).

3.5.3.1 Uji Pengaruh Simultan (F test)

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan

significance level 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bila nilai signifikansi $f < 0.05$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima yang berarti koefisien regresi signifikan, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikansi $f > 0.05$, maka H_0 diterima atau H_a ditolak yang berarti koefisien regresi tidak signifikan. Hal ini artinya keempat variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu (1) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel independen, tapi karena R^2 mengandung kelemahan mendasar, yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, maka dalam penelitian ini menggunakan *adjusted* R^2 berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai *adjusted* R^2 semakin mendekati 1 maka makin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel dependen.

3.5.3.3 Uji Parsial (t test)

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bila nilai signifikansi $t < 0.05$, maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikansi $t > 0.05$, maka H_0 diterima, artinya terdapat tidak ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari *Indonesia Stock Exchange (IDX)* 2008 diketahui bahwa perusahaan yang terdaftar sebanyak 407 perusahaan. Dari jumlah tersebut, hanya 116 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel penelitian yang telah ditetapkan. Penentuan sampel penelitian dilakukan dengan metode *purposive sampling*, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Ringkasan Perolehan Sampel Penelitian

KETERANGAN	JUMLAH
Jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008	407
Data tidak berhasil diperoleh secara fisik baik di BEI maupun Website	(162)
Data yang tersedia secara fisik	245
Data rusak, tidak lengkap, dan tidak memenuhi kriteria	(129)
Jumlah data yang digunakan sebagai Sampel	116

Sumber : Data IDX Statistics yang telah diolah

4.2 Analisis Data

4.2.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan suatu gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Hasil analisis deskriptif dengan

menggunakan *SPSS 17.0* dari variabel-variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
UKOM	116	2	10	4.72	1.854
RAKOM	116	1	51	8.87	8.963
INKOM	116	.2000	1.0000	.436792	.1285354
UDIT	116	2	7	3.44	.935
RADIT	116	1	51	10.26	9.174
KOMDIT	116	1	5	1.84	.938
MANJ	116	.000	77.700	2.14192	10.350370
INST	116	.0000	99.8900	42.165603	33.3399826
ASING	116	.0000	99.8000	27.280500	30.7995591
KONST	116	0	1	.59	.493
SIZE	116	10.1335	14.5544	12.425369	.8886195
LEV	116	-13.4067	14.9646	2.737468	3.8650753
CSRI	116	.0633	.6076	.206133	.0862054
Valid N (listwise)	116				

Sumber: Data yang telah diolah

Hasil analisis deskriptif diatas menunjukkan bahwa jumlah observasi (N) dari penelitian ini ada 116. Dari 116 observasi terhadap sampel, nilai variabel ukuran Dewan Komisaris yang terkecil adalah 2 dan yang terbesar adalah 10. Hal ini berarti jumlah Dewan Komisaris yang dimiliki suatu perusahaan paling sedikit berjumlah 2 orang dan paling banyak jumlah Dewan Komisaris perusahaan berjumlah 10 orang. Semakin besar nilai ukuran Dewan Komisaris berarti jumlah anggota Dewan Komisaris semakin banyak. Nilai rata-rata ukuran Dewan Komisaris sebesar 4,72 berarti rata-rata jumlah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan sampel adalah 4,72 orang. Standar deviasi sebesar 1,854 menunjukkan variasi yang terdapat dalam ukuran Dewan Komisaris.

Pada variabel Jumlah rapat Dewan Komisaris, nilai yang terkecil adalah 1 dan nilai yang terbesar adalah 51. Semakin besar nilai RAKOM, berarti frekuensi Dewan Komisaris melakukan rapat internal semakin sering. Hal ini berarti Dewan Komisaris suatu perusahaan paling sedikit mengadakan rapat 1 kali dan paling sering mengadakan 51 kali rapat. Nilai rata-rata sebesar 8,87 artinya rata-rata Dewan Komisaris perusahaan sampel mengadakan rapat sebanyak 8,87 kali. Standar deviasi sebesar 8,963 menunjukkan variasi yang terdapat dalam variabel Jumlah rapat Dewan Komisaris.

Pada variabel Independensi Dewan Komisaris, semakin besar nilai Independensi Dewan Komisaris berarti proporsi Komisaris Independen yang ada dalam Dewan Komisaris semakin banyak. Hasil statistik menunjukkan nilai yang terkecil adalah 0,20 dan nilai yang terbesar adalah 1,00. Hal ini berarti proporsi Komisaris Independen perusahaan paling kecil adalah 20% dan paling besar adalah 100% yang berarti kesemua anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Nilai rata-rata Proporsi Dewan Komisaris independen sebesar 0,436792. Standar deviasi sebesar 0,1285354 menunjukkan variasi yang terdapat dalam variabel Independensi Dewan Komisaris.

Pada variabel Ukuran Komite Audit, nilai yang terkecil adalah 2, dan nilai terbesar adalah 7 dengan nilai rata-rata sebesar 3,44. Hal ini berarti jumlah Komite Audit yang dimiliki perusahaan sampel paling sedikit 2 orang dan paling banyak memiliki anggota Komite Audit 7 orang dan rata-rata tiap perusahaan sampel memiliki Komite Audit sebanyak 3,44 orang. Standar deviasi sebesar 0,935 menunjukkan variasi yang terdapat dalam variabel Ukuran Komite Audit.

Pada variabel Jumlah rapat Komite Audit, Semakin besar nilainya berarti frekuensi Komite Audit melakukan rapat internal semakin sering. Nilai yang terkecil variabel ini adalah 1, dan nilai yang terbesar adalah 51 dengan nilai rata-rata sebesar 10,26. Hal ini berarti Komite Audit perusahaan sampel paling sedikit melakukan rapat sebanyak 1 kali dan paling sering adalah 51 kali dengan rata-rata rapat yang dilakukan Komite Audit sebanyak 10,26 kali. Standar deviasi sebesar 9,174 menunjukkan variasi yang terdapat dalam variabel Jumlah rapat Komite Audit.

Pada variabel Kompetensi Komite Audit, Semakin besar nilai variabel, semakin banyak anggota-anggota yang mempunyai pengetahuan, latar belakang dan pengalaman di bidang akuntansi dan atau keuangan (*financial literacy*). Nilai terkecil variabel ini adalah 1 dan nilai yang terbesar adalah 5. Hal ini berarti bahwa pada perusahaan sampel memiliki anggota Komite Audit yang kompeten paling sedikit adalah 1 orang dan paling banyak adalah 5 orang. Nilai rata-rata Kompetensi Komite Audit adalah 1,84 dan Standar deviasi sebesar 0,938 menunjukkan variasi yang terdapat dalam Kompetensi Komite Audit.

Pada variabel kepemilikan saham Manajerial, nilai yang terkecil adalah 0,00 persen dan nilai yang terbesar adalah 77,70 persen dengan nilai rata-rata sebesar 2,14192 persen. Hal ini berarti bahwa pada perusahaan sampel paling banyak terdapat 77,7 % saham perusahaan yang dimiliki oleh manajer dan paling sedikit adalah 0% artinya manajer perusahaan tidak memiliki sama sekali saham perusahaan. Rata-rata saham perusahaan yang dimiliki oleh manajer sebesar 2,14%

dan Standar deviasi sebesar 10,350370 menunjukkan variasi yang terdapat dalam kepemilikan saham Manajerial.

Pada variabel kepemilikan saham Institusional, nilai yang terkecil adalah 0,00 persen dan nilai yang terbesar adalah 99,89 persen dengan nilai rata-rata sebesar 42,165603 persen. Hal ini berarti saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi paling banyak adalah 99,89% dan paling rendah adalah 0% atau tidak dimiliki oleh pihak institusi sama sekali. Rata-rata saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi sebesar 42,17% dan Standar deviasi sebesar 33,3399826 menunjukkan variasi yang terdapat dalam kepemilikan saham Institusional.

Pada variabel kepemilikan saham Asing, nilai yang terkecil adalah 0,00 persen dan nilai yang terbesar adalah 99,80 persen dengan nilai rata-rata sebesar 27,280500 persen. Hal ini berarti saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak asing paling banyak adalah 99,80% dan paling rendah adalah 0% atau tidak dimiliki oleh pihak asing sama sekali. Rata-rata saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi sebesar 27,28% Standar deviasi sebesar 30,7995591 menunjukkan variasi yang terdapat dalam kepemilikan saham Asing.

Pada variabel kepemilikan saham Terkonsentrasi, nilai yang terkecil adalah 0 dan nilai yang terbesar adalah 1 dengan nilai rata-rata 0,59. Nilai 1 dalam variabel kepemilikan saham terkonsentrasi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mempunyai kepemilikan saham yang terkonsentrasi, sedangkan nilai 0 menunjukkan bahwa kepemilikan saham perusahaan bersifat tidak terkonsentrasi

atau menyebar. Standar deviasi sebesar 0,493 menunjukkan variasi yang terdapat dalam variabel kepemilikan saham Terkonsentrasi.

Pada variabel ukuran perusahaan (*size*), semakin besar nilainya, artinya perusahaan tersebut semakin besar karena mempunyai jumlah asset (*log Aset*) yang lebih banyak. Nilai yang terkecil adalah 10,1335 dan nilai yang terbesar adalah 14,5544 dengan nilai rata-rata sebesar 12,425369. Hal ini berarti jumlah *log Aset* yang dimiliki oleh perusahaan paling kecil adalah 10,1335 dan *log Aset* yang dimiliki oleh perusahaan paling besar adalah 14,5544 perusahaan. Standar deviasi sebesar 0,8886195 menunjukkan variasi yang terdapat dalam ukuran perusahaan.

Pada variabel Rasio Leverage perusahaan, semakin besar variabel tersebut, berarti nilai perbandingan hutang terhadap ekuitas semakin besar. Nilai yang terkecil adalah -13,4067 dan nilai yang terbesar adalah 14,9646 dengan nilai rata-rata sebesar 2,737468. Hal ini berarti perusahaan sampel mempunyai perbandingan antara utang dan ekuitas paling sedikit adalah -13% dan perusahaan yang memiliki perbandingan hutang terhadap ekuitas paling besar adalah 14% dan rata-rata perusahaan memiliki rasio leverage tersebut sebesar 2,7%. Standar deviasi sebesar 3,8650753 menunjukkan variasi yang terdapat dalam Rasio Leverage perusahaan.

Pada variabel pengungkapan CSR, semakin besar nilai variabel CSRI, artinya perusahaan lebih banyak melakukan pengungkapan item CSR. Nilai yang terkecil adalah 0,0633 dan nilai yang terbesar adalah 0,6076 dengan nilai rata-rata sebesar 0,206133. Hal ini berarti bahwa perusahaan paling sedikit

mengungkapkan CSR yang sesuai dengan pedoman GRI sebesar 6,33% dan paling banyak mengungkapkan sesuai dengan pedoman GRI adalah 60,76%. Rata-rata pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan adalah 20,61% sesuai dengan pedoma GRI. Standar deviasi sebesar 0,0862054 menunjukkan variasi yang terdapat dalam indeks. Besarnya indeks menunjukkan besarnya pengungkapan tanggung jawab sosial oleh perusahaan.

4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

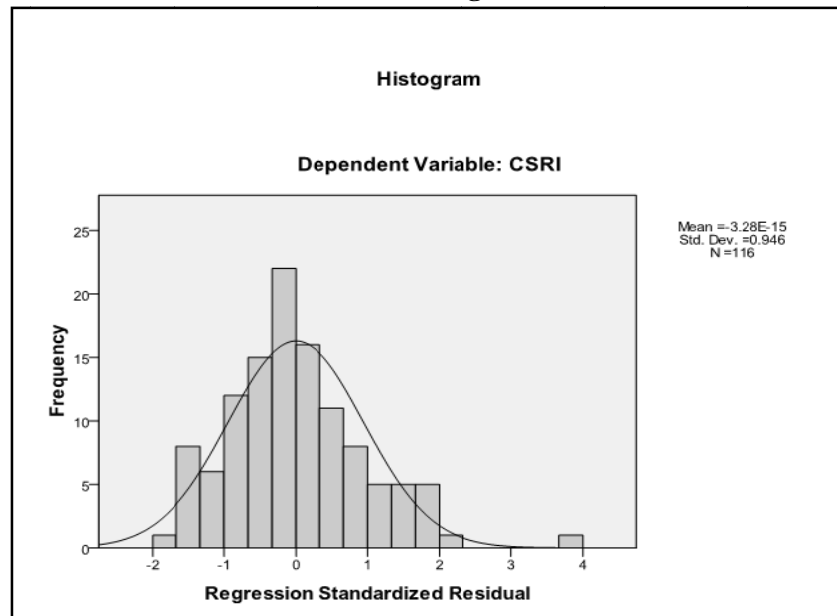
4.2.2.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Suatu model regresi yang baik adalah dimana datanya berdistribusi normal atau mendekati normal. Distribusi normal dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan analisis grafik histogram dan *normal probability plot*, dan analisis statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal.

Berdasarkan hasil dari uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penyebaran data mendekati normal atau memenuhi asumsi normalitas. Hal ini didukung dengan tampilan grafik histogram yang menunjukkan pola distribusi normal. Berikut

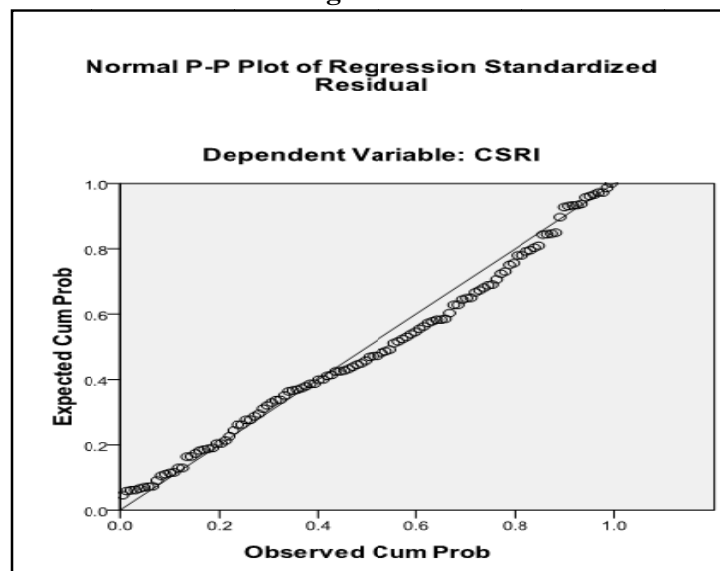
masing-masing tampilan garfik histogram dan *normal probability plot* yang ditunjukkan dalam Gambar 4.1 dan Gambar 4.2.

Gambar 4.1
Grafik Histogram



Sumber : data yang telah diolah

Gambar 4.2
Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : data yang telah diolah

Tabel 4.3
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		116
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.06230516
Most Extreme Differences	Absolute	.073
	Positive	.073
	Negative	-.042
Kolmogorov-Smirnov Z		.790
Asymp. Sig. (2-tailed)		.560

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : data yang telah diolah

Pada hasil uji statistik non-parametrik *Kolmogorov - Smirnov (K-S)* dapat dilihat bahwa nilai *Kolmogorov - Smirnov* sebesar 0.790 dan tidak signifikan pada 0,05 (karena $p = 0,560 > 0,05$), maka dapat dinyatakan bahwa residual berdistribusi normal.

4.2.2.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat dengan membandingkan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor (VIF)*. Multikolinearitas terjadi jika nilai Tolerance < 0,10 atau nilai VIF > 10.

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	1 (Constant)	-.418	.129				-3.238
UKOM	.002	.004	.051	.560	.576	.615	1.625
RAKOM	.001	.001	.147	1.641	.104	.629	1.589
INKOM	-.019	.058	-.029	-.334	.739	.672	1.487
UDIT	.006	.010	.063	.580	.563	.432	2.317
RADIT	.001	.001	.130	1.524	.131	.693	1.443
KOMDIT	-.017	.009	-.184	-1.847	.068	.512	1.954
MANJ	.000	.001	.060	.786	.434	.876	1.141
INST	.000	.000	-.287	-2.392	.019	.353	2.829
ASING	.000	.000	-.202	-1.746	.084	.379	2.641
KONST	.033	.013	.189	2.544	.012	.921	1.086
SIZE	.053	.011	.544	4.738	.000	.384	2.602
LEV	-.008	.002	-.365	-3.961	.000	.596	1.678

a. Dependent Variable: CSRI

Sumber : data yang telah diolah

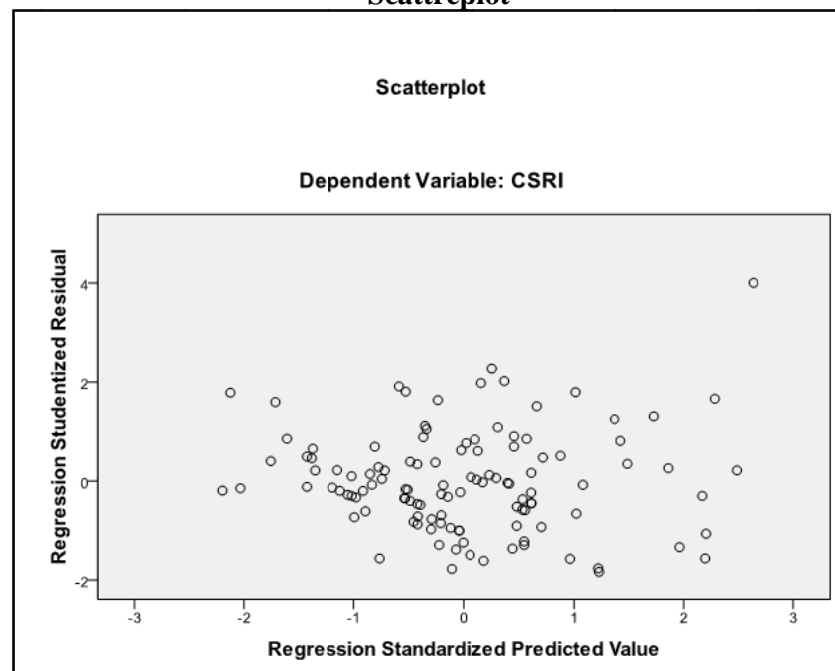
Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa UKOM, RAKOM, INKOM, UDIT, RADIT, KOMDIT, MANJ, INST, ASING, KONST, SIZE, dan LEV menunjukkan nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model regresi penelitian ini adalah terbebas dari multikolinearitas atau dapat dipercaya dan obyektif.

4.2.2.3 Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan

lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas atau yang tidak terjadi Heterokedastisitas. Penelitian ini menggunakan cara dengan melihat grafik plot untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas (Ghozali,2007).

Gambar 4.3
Scattreplot



Sumber : data yang telah diolah

Berdasarkan hasil pengujian dengan tingkat probabilitas signifikansi variabel independen $< 0,05$ atau 5%, pada gambar 4.3 dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas atau menyebar, titik-titik penyebaran berada di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

4.2.3 Hasil Pengujian Hipotesis

4.2.3.1 Hasil Uji F (F test)

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dari hasil pengujian ini pada tabel 4.6 dapat dilihat pada nilai F hitung sebesar 7,848 dan signifikan pada 0,000. Dengan menggunakan tingkat α (alfa) 0,05 atau 5%, maka H_0 berhasil ditolak dan H_1 gagal ditolak. Penolakan H_0 dibuktikan dengan hasil perhitungan bahwa nilai sig (0,000) < dari α (alfa) = 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel UKOM, RAKOM, INKOM, UDIT, RADIT, KOMDIT, MANJ, INST, ASING, KONST, SIZE, dan LEV secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel pengungkapan CSR (CSRI).

Tabel 4.5
Hasil Uji F (F test)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.408	12	.034	7.848	.000 ^a
	Residual	.446	103	.004		
	Total	.855	115			

a. Predictors: (Constant), LEV, MANJ, KONST, ASING, RADIT, UKOM, KOMDIT, INKOM, RAKOM, UDIT, SIZE, INST

b. Dependent Variable: CSRI

Sumber : data yang telah diolah

4.2.3.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji *goodness of-fit* dari model regresi, yaitu seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.6
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.691 ^a	.478	.417	.0658346

a. Predictors: (Constant), LEV, MANJ, KONST, ASING, RADIT, UKOM, KOMDIT, INKOM, RAKOM, UDIT, SIZE, INST

b. Dependent Variable: CSRI

Sumber : data yang telah diolah

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat besar nilai *adjusted R²* sebesar 0,417 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 41,7%. Hal ini berarti 41,7% pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dipengaruhi variabel ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Jumlah rapat Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Jumlah rapat Komite Audit, kompetensi Komite Audit, kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham asing, kepemilikan saham terkonsentrasi, ukuran (*size*) perusahaan dan rasio *Leverage* perusahaan. Sedangkan sisanya 58,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Standar Error of the Estimate (SEE) menunjukkan nilai 0,658346 hal ini menunjukkan nilai yang kecil sehingga dapat disimpulkan model regresi layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Sementara itu, nilai R sebesar 0,691 menunjukkan hubungan antara variabel dependen yaitu pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan variabel independen yaitu ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Jumlah rapat Dewan

Komisaris, Ukuran Komite Audit, Jumlah rapat Komite Audit, kompetensi Komite Audit, kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham asing, kepemilikan saham terkonsentrasi, ukuran (*size*) perusahaan dan rasio *Leverage* perusahaan cukup kuat.

4.2.3.3 Hasil Uji t

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan signifikansi dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan untuk memeriksa lebih lanjut manakah diantara kedua belas variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dari kedua belas variabel independen yang dimasukkan dalam model dengan signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa variabel INST, KONST, SIZE, LEV berpengaruh signifikan terhadap variabel CSRI, sedangkan variabel UKOM, RAKOM, INKOM, UDIT, RADIT, KOMDIT, MANJ, ASING, tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel CSRI.

Tabel 4.7
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Keputusan Terhadap Ha
	B	Std. Error	Beta			
1(Constant)	-.418	.129		-3.238	.002	
UKOM	.002	.004	.051	.560	.576	Ditolak
RAKOM	.001	.001	.147	1.641	.104	Ditolak
INKOM	-.019	.058	-.029	-.334	.739	Ditolak
UDIT	.006	.010	.063	.580	.563	Ditolak
RADIT	.001	.001	.130	1.524	.131	Ditolak
KOMDIT	-.017	.009	-.184	-1.847	.068	Ditolak
MANJ	.000	.001	.060	.786	.434	Ditolak
INST*	.000	.000	-.287	-2.392	*.019	Ditolak
ASING	.000	.000	-.202	-1.746	.084	Ditolak
KONST*	.033	.013	.189	2.544	*.012	Diterima
SIZE*	.053	.011	.544	4.738	*.000	Diterima
LEV*	-.008	.002	-.365	-3.961	*.000	Diterima

Sumber : data yang telah diolah

* signifikan

Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

Variabel Ukuran Dewan Komisaris (UKOM) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,560 dan nilai *sig* sebesar 0,576. Nilai *sig* $0,576 > \alpha$ (0,05), hal ini berarti variabel Ukuran Dewan Komisaris (UKOM) tidak signifikan pada level 5% sehingga penelitian ini tidak dapat menolak H_0 . Dapat disimpulkan bahwa variabel Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan CSR perusahaan. Dengan demikian, H_1 “Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR” ditolak.

Variabel Jumlah rapat Dewan Komisaris (RAKOM) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,641 dan nilai *sig* sebesar 0,104. Nilai *sig* $0,104 > \alpha$ (0,05), hal ini

berarti variabel Jumlah rapat Dewan Komisaris (RAKOM) tidak signifikan pada level 5% sehingga penelitian ini tidak dapat menolak H_0 . Dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah rapat Dewan Komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan CSR perusahaan. Dengan demikian, H_2 “Jumlah rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR” ditolak.

Variabel Independensi Dewan Komisaris (INKOM) memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0,334 dan nilai *sig* sebesar 0,739. Nilai *sig* 0,739 > α (0,05), hal ini berarti variabel Independensi Dewan Komisaris (INKOM) tidak signifikan pada level 5% sehingga penelitian ini tidak dapat menolak H_0 . Dapat disimpulkan bahwa variabel Independensi Dewan Komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan CSR perusahaan. Dengan demikian, H_3 “Independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR” ditolak.

Variabel Ukuran Komite Audit (UDIT) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,580 dan nilai *sig* sebesar 0,563. Nilai *sig* 0,563 > α (0,05), hal ini berarti variabel Ukuran Komite Audit (UDIT) tidak signifikan pada level 5% sehingga penelitian ini tidak dapat menolak H_0 . Dapat disimpulkan bahwa variabel Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan CSR perusahaan. Dengan demikian, H_4 “Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR” ditolak.

Variabel Jumlah rapat Komite Audit (RADIT) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,524 dan nilai *sig* sebesar 0,131. Nilai *sig* 0,131 > α (0,05), hal ini

berarti variabel Jumlah rapat Komite Audit (RADIT) tidak signifikan pada level 5% sehingga penelitian ini tidak dapat menolak H_0 . Dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah rapat Komite Audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan CSR perusahaan. Dengan demikian, H_5 “Jumlah rapat Komite Audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR” ditolak.

Variabel Kompetensi Komite Audit (KOMDIT) memiliki nilai t_{hitung} sebesar -1,847 dan nilai sig sebesar 0,680. Nilai sig $0,680 > \alpha$ (0,05), hal ini berarti variabel Kompetensi Komite Audit (KOMDIT) tidak signifikan pada level 5% sehingga penelitian ini tidak dapat menolak H_0 . Dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi Komite Audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan CSR perusahaan. Dengan demikian, H_6 “Jumlah rapat Komite Audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR” ditolak.

Variabel Kepemilikan saham Manajerial (MANJ) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,786 dan nilai sig sebesar 0,434. Nilai sig $0,434 > \alpha$ (0,05), hal ini berarti variabel Kepemilikan saham Manajerial (MANJ) tidak signifikan pada level 5% sehingga penelitian ini tidak dapat menolak H_0 . Dapat disimpulkan bahwa variabel Kepemilikan saham Manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan CSR perusahaan. Dengan demikian, H_7 “Kepemilikan saham manajerial berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR” ditolak.

Variabel Kepemilikan saham Institusional (INST) memiliki nilai t_{hitung} sebesar -2,392 dan nilai sig sebesar 0,019. Nilai sig $0,019 < \alpha$ (0,05), hal ini berarti variabel Kepemilikan saham Institusional (INST) signifikan pada level 5%

tetapi dengan arah koefisien yang negatif, sehingga penelitian ini tidak dapat menolak H_0 . Dapat disimpulkan bahwa variabel Kepemilikan saham Institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap luas pengungkapan CSR perusahaan. Dengan demikian, H_8 “Kepemilikan saham Institusional berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR” ditolak.

Variabel Kepemilikan saham Asing (ASING) memiliki nilai t_{hitung} sebesar -1,746 dan nilai *sig* sebesar 0,084. Nilai *sig* $0,084 > \alpha$ (0,05), hal ini berarti variabel Kepemilikan saham Asing (ASING) tidak signifikan pada level 5% sehingga penelitian ini tidak dapat menolak H_0 . Dapat disimpulkan bahwa variabel Kepemilikan saham Asing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan CSR perusahaan. Dengan demikian, H_9 “Kepemilikan saham asing berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR” ditolak.

Variabel Kepemilikan saham Terkonsentrasi (KONST) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,554 dan nilai *sig* sebesar 0,012. Nilai *sig* $0,012 < \alpha$ (0,05), hal ini berarti variabel Kepemilikan saham Terkonsentrasi (KONST) signifikan pada level 5% sehingga penelitian ini berhasil menolak H_0 . Dapat disimpulkan bahwa variabel Kepemilikan saham Terkonsentrasi berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan CSR perusahaan. Dengan demikian, H_{10} “Kepemilikan saham terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR” diterima.

Variabel Ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 4,738 dan nilai *sig* sebesar 0,000. Nilai *sig* $0,000 < \alpha$ (0,05), hal ini berarti variabel Ukuran perusahaan (SIZE) signifikan pada level 5% sehingga penelitian ini

berhasil menolak H_0 . Dapat disimpulkan bahwa variabel Ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan CSR perusahaan. Dengan demikian, H_{11} “Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR” diterima.

Variabel Rasio Leverage perusahaan (LEV) memiliki nilai t_{hitung} sebesar -3,961 dan nilai *sig* sebesar 0,000. Nilai *sig* $0,000 < \alpha$ (0,05), hal ini berarti variabel Rasio Leverage perusahaan (LEV) signifikan pada level 5% sehingga penelitian ini berhasil menolak H_0 . Dapat disimpulkan bahwa variabel Rasio Leverage perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan CSR perusahaan. H_{12} “Rasio leverage perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR” diterima.

4.3 Interpretasi Hasil

4.3.1 Pengungkapan CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Berdasarkan hasil *content analysis* yang dilakukan terhadap 116 perusahaan sampel yang terdaftar di BEI tahun 2008, diperoleh hasil yang menggambarkan tingkat pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tersaji pada Lampiran C Daftar Pengungkapan CSR perusahaan. Jumlah pengungkapan paling luas atau banyak dilakukan oleh Antam Tbk. yaitu sebanyak 48 item atau sebesar 0,61 dari total pengungkapan yang dianjurkan oleh GRI, sedangkan paling sedikit adalah 5 item atau sebesar 0,06 dari total pengungkapan yang dilakukan oleh Asuransi Dayin Mitra Tbk dan Indocitra Finance Tbk. Berdasarkan analisis secara fisik laporan tahunan yang

dipublikasikan perusahaan tersebut sudah dapat menggambarkan tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga perbedaan antara nilai pengungkapan maksimum dan minimum pada penelitian ini dapat dibuktikan lebih lanjut.

Berdasarkan Tabel 4.2 tentang statistik deskriptif penelitian ini diketahui bahwa rata-rata perusahaan di Indonesia melakukan pengungkapan CSR pada laporan tahunannya hanya sebesar 20,61% saja. Hal ini berarti tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan-perusahaan di Indonesia tergolong masih rendah. Walaupun secara yuridis formal, pemerintah sudah mewajibkan kepada perusahaan di Indonesia khususnya yang terdaftar di BEI untuk melakukan praktik dan pengungkapan tanggung jawab sosial melalui Undang-undang No. 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007, namun hasil penelitian membuktikan bahwa tingkat pengungkapan CSR di Indonesia masih tergolong rendah.

Masih rendahnya tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan di Indonesia ini berarti menunjukkan bahwa peraturan yang dibuat oleh pemerintah masih belum efektif. Perusahaan kemungkinan akan melakukan kegiatan praktik dan pengungkapan CSR hanya untuk memenuhi aturan yang telah ditetapkan oleh badan regulasi seperti Pemerintah, BEI, Bapepam. Hal ini kemungkinan disebabkan karena belum ada peraturan baku dari pemerintah yang benar-benar mengatur pelaksanaan dan pengungkapan CSR, mengenai hal apa saja yang harus dilakukan dan dilaporkan. Selain itu, dimungkinkan karena perusahaan juga masih memikirkan dan memperhitungkan biaya untuk melakukan

pelaporan tersebut, karena melakukan praktik dan pelaporan tersebut menyangkut biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang jumlahnya cukup signifikan sehingga harus dipertimbangkan dengan baik oleh manajemen perusahaan.

4.3.2 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan CSR

Berdasarkan hasil pengujian variabel Ukuran Dewan Komisaris (UKOM) terhadap tingkat pengungkapan CSR (CSRI), dapat diketahui bahwa variabel Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan CSR perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H_1) “Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR” ditolak. Ukuran Dewan Komisaris yang mempunyai arah koefisien positif namun tidak signifikan terhadap luas pengungkapan CSR.

Hasil Penelitian ini konsisten dengan penemuan Matoussi dan Chakroun (2008), yang menyatakan bahwa ukuran Dewan Komisaris tidak mempengaruhi luas pengungkapan sukarela. Ketentuan di Indonesia dalam UU No. 40 tahun 2007 menyebutkan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Hal ini berarti besar kecilnya Ukuran Dewan Komisaris tidak dapat menjamin adanya mekanisme pengawasan yang lebih baik, karena bukan merupakan faktor penentu utama dari efektivitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan.

Efektivitas mekanisme pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tergantung pada nilai, norma dan kepercayaan yang diterima

dalam suatu organisasi (Jennings 2004a; 2004b; 2005a; Oliver, 2004 dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Dengan demikian, untuk mencapai transparansi dan pengungkapan CSR yang lebih luas, maka pembantuan Dewan Komisaris harus memperhatikan komposisi, kemampuan, dan integritas anggota, sehingga dapat melakukan fungsi pengawasan, pengendalian dan mampu memberikan arahan kepada manajemen dengan baik demi kepentingan perusahaan.

4.3.3 Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan CSR

Berdasarkan hasil pengujian parsial antara variabel Jumlah rapat Dewan Komisaris terhadap pengungkapan CSR yang disajikan dalam tabel Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa Jumlah rapat Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan di Indonesia. Dengan demikian, hipotesis kedua (H_2) “Jumlah rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR” ditolak. Hal ini berarti bahwa berapapun frekuensi rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, tidak akan mempengaruhi luas pengungkapan CSR yang disajikan dalam laporan tahunan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Mizrawati (2009) yang menunjukkan temuan bahwa tidak terdapat hubungan antara frekuensi pertemuan Dewan Komisaris dengan tingkat pengungkapan sukarela. Hal ini terjadi dimungkinkan karena rapat-rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris kurang efektif, dikarenakan adanya dominasi suara dari anggota Dewan Komisaris yang mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya sehingga mengesampingkan kepentingan perusahaan (Muntoro, 2006).

4.3.4 Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan CSR

Dalam penelitian ini, Independensi Dewan Komisaris yang dimaksud adalah proporsi Komisaris Independen terhadap jumlah total anggota Dewan Komisaris. Variabel ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan CSR perusahaan dan memiliki arah koefisien negatif. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa “Independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR” ditolak.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Said *et.al.* (2009) yang menunjukkan bahwa Independensi atau proporsi Komisaris Independen tidak dapat berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR perusahaan. Dengan demikian keberadaan atau proporsi Komisaris Independen tidak dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dikarenakan mereka tidak mempunyai hubungan dengan aktivitas atau operasi sehari-hari perusahaan (Che Ahmad *et. al.*, 2003 dalam Hashim dan Devi, 2007).

Alasan yang dapat menjelaskan hal ini adalah dimungkinkan karena pemilihan dan pengangkatan Komisaris Independen yang kurang efektif (FCGI, 2002). Hal ini merupakan isu atau hal yang penting, bahwa banyak anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kemampuan, dan tidak dapat menunjukkan independensinya atau sebenarnya tidak independen (*not truly independent*), sehingga fungsi pengawasan tidak dapat berjalan dengan baik (Vethanayagam *et. al.*, 2006 dalam Hashim dan Devi, 2007). Dengan demikian, keberadaan atau proporsi Komisaris Independen tidak dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mengenai pengungkapan CSR.

4.3.5 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Pengungkapan CSR

Pada uji parsial (t test) Tabel 4.7, penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel Ukuran Komite Audit (UDIT) memiliki hubungan arah positif namun tidak signifikan. Hal ini berarti variabel Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR perusahaan di Indonesia. Dengan demikian, hipotesis keempat (H_4) yang diajukan “Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR” ditolak.

Hasil penelitian ini, mendukung hasil penelitian Mohd-Nasir dan Abdullah (2004) dan Akhtaruddin *et.al.*, (2009) yang menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh antara ukuran Komite Audit dengan tingkat pengungkapan sukarela. Hal ini berarti berapapun jumlah anggota Komite Audit tidak akan mempengaruhi luas pengungkapan CSR karena belum dapat menjadikan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap manajemen perusahaan.

Alasan yang dapat digunakan untuk menjelaskan hal ini adalah berdasarkan Tabel 4.2 statistik deskriptif, dari data yang telah diolah diketahui bahwa rata-rata Ukuran Komite Audit perusahaan adalah 3 orang, yang artinya bahwa sebagian besar perusahaan memiliki jumlah anggota Komite Audit yang sama yaitu 3 (tiga) orang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ukuran Komite Audit akan menjadi tidak berpengaruh terhadap mekanisme pengawasan dan pengungkapan CSR karena dimungkinkan jumlah anggota Komite Audit tersebut hanya sebagai formalitas untuk memenuhi peraturan Bapepam nomor IX.I.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit, tanpa mempertimbangkan efektivitas dan kompleksitas perusahaan.

4.3.6 Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit terhadap Pengungkapan CSR

Berdasarkan hasil pengujian variabel Jumlah rapat Komite Audit (UDIT) terhadap tingkat pengungkapan CSR (CSRI), ditemukan bahwa Jumlah rapat Komite Audit tidak signifikan pada level 5% dengan arah hubungan positif, sehingga hipotesis kelima (H_5) yang menyebutkan bahwa “Jumlah rapat Komite Audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR” ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara frekuensi rapat yang dilakukan Komite Audit dengan luas pengungkapan CSR.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahman dan Ali (2006) dan Widowati (2009). Rahman dan Ali (2006) menyatakan bahwa tingkat frekuensi atau jumlah pertemuan yang dilakukan oleh Komite Audit tidak menjamin bahwa pelaksanaan monitoring terhadap manajemen untuk melakukan kecurangan akan berjalan secara efektif. Sehingga peluang manajemen untuk melakukan kecurangan dengan menyembunyikan informasi masih dapat dimungkinkan. Alasan yang dapat menjelaskan hal ini dimungkinkan adalah faktor kompetensi Komite Audit yang diteliti juga dalam penelitian ini, menemukan hasil bahwa kompetensi yang dimiliki oleh Komite Audit kurang memadai sehingga tidak mampu menjalankan tugasnya secara efektif. Sebab untuk menjadikan fungsi Komite Audit yang efektif tidak hanya memperhatikan ukuran, jumlah pertemuan saja, tetapi juga kualitas dan kompetensi anggota Komite Audit.

4.3.7 Pengaruh Kompetensi Komite Audit terhadap pengungkapan CSR

Variabel Kompetensi Komite Audit dalam penelitian ini adalah yang menyangkut bidang akuntansi dan atau keuangan (*financial literacy*). Hasil penelitian ini menunjukkan variabel Kompetensi Komite Audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan CSR perusahaan dengan arah koefisien negatif. Dengan demikian, hipotesis keenam (H_6) “Jumlah rapat Komite Audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR” ditolak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan Kompetensi Komite Audit yang menyangkut bidang akuntansi dan atau keuangan tidak dapat meningkatkan luas pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan di Indonesia. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Rahman dan Ali (2006) menemukan bukti bahwa Kompetensi Komite Audit dalam hal keuangan atau akuntansi (*financial literacy*) tidak menjamin adanya mekanisme pengawasan yang lebih baik untuk mencegah pihak manajemen melakukan tindakan yang dapat merugikan pemilik atau perusahaan.

Hal ini dapat dijelaskan karena fungsi Komite Audit tidak hanya bertanggung jawab dalam pengawasan pelaporan keuangan, namun juga termasuk pengawasan pelaksanaan GCG dan pengendalian internal perusahaan. Dengan demikian, keahlian dan kompetensi Komite audit di bidang keuangan dan akuntansi (*financial literacy*) saja tidak cukup untuk menjamin dan membantu pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris. Oleh karena itu, agar mekanisme pengawasan berjalan dengan baik, maka Komite Audit juga tidak hanya harus kompeten dalam bidang akuntansi atau keuangan saja, namun harus kompeten

juga pada keahlian dan pemahaman lain dibidang hukum, peraturan pasar modal, serta proses bisnis terkait (Alijoyo, 2003).

4.3.8 Pengaruh Kepemilikan Saham Manajerial terhadap Pengungkapan CSR

Berdasarkan hasil pengujian parsial antara variabel Kepemilikan saham Manajerial terhadap pengungkapan CSR yang disajikan dalam tabel Tabel 4.7 diketahui bahwa Kepemilikan saham manajerial memiliki arah hubungan yang positif, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan di Indonesia. Oleh karena itu, hipotesis ketujuh (H₇) yang menyebutkan bahwa “Kepemilikan saham manajerial berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR” ditolak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berapapun persentase saham perusahaan dimiliki oleh pihak manajer, tidak akan mempengaruhi luas pengungkapan CSR yang disajikan dalam laporan tahunan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Huafang dan Jianguo, (2007) dan Said *et.al.* (2009) yang membuktikan bahwa kepemilikan saham oleh pihak manajemen tidak mempengaruhi luas pengungkapan CSR. Hal ini dimungkinkan karena secara statistik jumlah kepemilikan saham manajerial rata-rata pada perusahaan-perusahaan di Indonesia jumlahnya relatif kecil, hanya sebesar 2,14% dan hanya beberapa perusahaan saja yang memiliki kepemilikan manajerial yang cukup besar. Hal ini berarti, dengan kepemilikan manajerial yang relatif kecil, maka masih terjadi konflik kepentingan antara pemilik dengan manajer, dimana kepentingan pribadi manajer belum dapat diselaraskan dengan

kepentingan perusahaan atau pemilik. Dengan demikian, dengan kepemilikan manajerial yang relatif kecil, tindakan manajer untuk berusaha memaksimalkan nilai perusahaan yang selaras dengan kepentingan pemilik untuk melakukan pengungkapan CSR masih belum dapat dilakukan.

4.3.9 Pengaruh Kepemilikan Saham Institusional terhadap Pengungkapan CSR

Variabel Kepemilikan saham Institusional (INST) memiliki nilai yang signifikan pada level 5% tetapi dengan arah koefisien yang negatif, sehingga hipotesis kedelapan (H_8) yang menyatakan “Kepemilikan saham Institusional berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR” ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Kepemilikan saham Institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap luas pengungkapan CSR perusahaan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Bushee *et. al.*, (2003) dan Bouri dan Khlifi, (2007) dalam Matoussi dan Chakroun (2008) yang menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara kepemilikan saham institusional dengan luas pengungkapan sukarela. Artinya semakin tinggi tingkat kepemilikan saham oleh institusi, maka akan mengurangi tingkat pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan.

Hal ini dikarenakan semakin banyak saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi, maka institusi mempunyai kemampuan untuk melakukan intervensi terhadap jalannya perusahaan dan mengatur proses penyusunan laporan keuangan. Akibatnya manajer terpaksa melakukan tindakan tertentu demi untuk memenuhi keinginan pihak-pihak tertentu, diantaranya pemilik (Boediono, 2005). Dengan demikian, apabila kepemilikan saham Institusi dalam perusahaan

jumlahnya semakin besar, maka hanya memaksimalkan keuntungan pribadi, tanpa mempedulikan tanggung jawabnya kepada stakeholders lain.

4.3.10 Pengaruh Kepemilikan Saham Asing terhadap Pengungkapan CSR

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Kepemilikan saham Asing tidak mempengaruhi luas pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan di Indonesia. Berdasarkan hasil dari pengujian variabel kepemilikan saham asing (ASING) dalam Tabel 4.7 memiliki nilai tidak signifikan pada level 5% dengan arah koefisien negatif. Dengan demikian, hipotesis kesembilan (H_9) “Kepemilikan saham asing berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR” ditolak. Dengan kata lain, pihak asing yang memiliki saham di perusahaan Indonesia cenderung tidak mempengaruhi atau menuntut pengungkapan CSR secara luas dalam laporan tahunan, khususnya item pengungkapan yang sesuai dengan indikator GRI.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amran dan Devi (2008); Machmud dan Djakman (2008); dan Said *et.al.* (2009) dimana secara statistik adanya kepemilikan saham asing pada perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR perusahaan. Apabila dihubungkan dengan teori agensi, maka kepemilikan oleh pihak asing tidak mampu menjadikan proses monitoring menjadi lebih baik, sehingga informasi yang dimiliki oleh pihak manajemen tidak diberikan secara menyeluruh kepada pemilik demi tujuan tertentu.

Variabel kepemilikan saham Asing mempunyai arah hubungan yang negatif terhadap pengungkapan CSR. Hal ini menjadi suatu anomali, karena

investor asing terutama yang berasal dari Eropa dan *United State* cenderung lebih mempedulikan masalah lingkungan dan sosial sehingga dapat akan mendorong meningkatkan pengungkapan CSR perusahaan. Alasan yang dapat digunakan untuk menjelaskan hal tersebut adalah bahwa kemungkinan kepemilikan asing pada perusahaan di Indonesia secara umum belum mempedulikan masalah lingkungan dan sosial sebagai isu kritis yang harus secara ekstensif untuk diungkapkan dalam laporan tahunan (Machmud dan Djakman, 2008). Alasan lain dimungkinkan jika kepemilikan asing dikonsolidasikan dengan perusahaan induk di negara asal maka kemungkinan persentase kepemilikan tersebut sangat kecil, sehingga mereka menjadi kurang memperhatikan pengungkapan CSR sebagai suatu hal yang penting untuk diungkapkan kepada publik.

4.3.11 Pengaruh Kepemilikan Saham Terkonsentrasi terhadap Pengungkapan CSR

Pada hasil uji parsial (t test) Tabel 4.7, menunjukkan nilai signifikan pada level 5%. Hal ini berarti kepemilikan saham yang terkonsentrasi berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan di Indonesia. Dengan demikian, hipotesis kesepuluh (H_{10}) “Kepemilikan saham terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR” diterima. Dengan kata lain, semakin terkonsentrasi saham perusahaan kepada pemilik tertentu baik perorangan maupun kelompok, maka akan semakin luas tingkat pengungkapan CSR yang akan dilaporkan dalam laporan tahunan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Said *et.al.* (2009) yang menemukan hubungan yang positif dan

signifikan antara konsentrasi kepemilikan saham dengan luas pengungkapan CSR. Menurut Matoussi dan Chakroun (2008), kepemilikan saham terkonsentrasi dapat mengurangi masalah konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen. Hal ini berarti kepemilikan saham terkonsentrasi menjadi mekanisme internal pendisiplinan manajemen, sebagai salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas monitoring, karena dengan kepemilikan yang besar menjadikan pemegang saham memiliki akses informasi yang cukup signifikan untuk mengimbangi keuntungan informasional yang dimiliki manajemen sehingga dapat mengurangi masalah agensi dan hal ini dapat mendorong pengungkapan CSR secara lebih luas.

4.3.12 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan CSR

Banyak penelitian yang meneliti mengenai hubungan pengaruh antara ukuran perusahaan (*firm's size*) dengan pengungkapan CSR. Berdasarkan hasil pengujian pengaruh parsial variabel ukuran perusahaan (SIZE) terhadap pengungkapan CSR (CSRI), dapat diketahui bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Belkaoui dan Karpik (1989), Hackston dan Milne (1996), Sembiring (2005), Rosmasita (2007), Amran dan Devi (2008), Machmud dan Djakman (2008), dan Puspitasari (2009) menemukan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR.

Terdapat hubungan signifikan antara variabel ukuran perusahaan dan pengungkapan CSR mengandung arti bahwa semakin besar suatu perusahaan,

maka akan cenderung melakukan pengungkapan CSR yang lebih luas. Dalam kerangka teori agensi, apabila ukuran perusahaan lebih besar, maka biaya keagenan yang dikeluarkan juga lebih besar, sehingga untuk mengurangi biaya keagenan tersebut, perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas. Di samping itu perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti, pengungkapan yang lebih besar merupakan cara untuk mengurangi biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan (Sembiring, 2005).

Menurut Cowen *et. al.*, (1987) dalam Sembiring (2005), secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan. Perusahaan yang lebih besar mempunyai aktivitas operasi yang lebih banyak dan memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat, serta mungkin akan memiliki pemegang saham yang lebih banyak yang akan selalu memperhatikan program sosial yang dibuat perusahaan sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin luas

4.3.13 Pengaruh Rasio Leverage Perusahaan terhadap Pengungkapan CSR

Dalam penelitian ini, *leverage* yang diproksi dengan rasio hutang terhadap modal sendiri atau ekuitas. Pada uji parsial (t test) Tabel 4.7, penelitian ini menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan CSR dengan nilai signifikan pada 5% Hal ini berarti hipotesis H_{12} yang menyatakan bahwa rasio *leverage* perusahaan berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan CSR dapat diterima. Dengan kata lain, semakin rendah tingkat *leverage* perusahaan, maka pengungkapan CSR yang dilakukan akan semakin luas dan sebaliknya, semakin

tinggi rasio *leverage* perusahaan maka pengungkapan CSR yang dilakukan menjadi lebih sedikit atau rendah.

Hasil penelitian ini berhasil mendukung teori agensi dan hasil penelitian Belkaoui & Karpik (1989) dan Waryanti (2009) menemukan bahwa faktor tingkat *leverage* perusahaan mempengaruhi secara negatif terhadap luas pengungkapan sosial perusahaan. Menurut Belkaoui & Karpik (1989), semakin tinggi tingkat *leverage* (rasio utang/ekuitas) semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit, sehingga perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi yang dapat dilakukan dengan cara mengurangi biaya-biaya, termasuk biaya untuk mengungkapkan informasi sosial.

Keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial akan mengikuti suatu pengeluaran untuk pengungkapan yang menurunkan pendapatan. Dalam hal ini dengan pengungkapan informasi sosial (CSR) berarti dapat menurunkan laba perusahaan. *Leverage* juga mencerminkan tingkat resiko keuangan perusahaan. Berdasarkan teori agensi, tingkat *leverage* mempunyai pengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Manajemen perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari para *debtholders*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dalam konsep GCG, perusahaan diharuskan untuk memenuhi prinsip-prinsip yang akan membangun tata kelola perusahaan yang baik yaitu: *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness*. Dengan demikian, sebelum perusahaan mempraktikkan CSR, manajemen internal perusahaan harus sudah dikelola dengan baik atau memenuhi prinsip *good corporate governance* yang berhubungan dengan segi *Transparency, Accountability, dan Responsibility*. Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut salah satu kewajiban perusahaan adalah untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*. Dengan terwujudnya GCG ini diharapkan akan membawa pengembangan bisnis perusahaan ke arah yang berkesinambungan sehingga akan mempermudah perusahaan dalam menerapkan CSR.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor Ukuran Dewan Komisaris, Jumlah rapat Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Jumlah rapat Komite Audit, Kompetensi Komite Audit, Kepemilikan saham manajerial, Kepemilikan saham institusional, Kepemilikan saham Asing, dan Kepemilikan saham terkonsentrasi serta Ukuran dan Leverage secara bersama-sama mempengaruhi pengungkapan CSR hanya sebesar 41,7%. Dengan

demikian faktor-faktor karakteristik GCG tersebut diatas masih belum dapat meningkatkan mekanisme pengawasan dengan baik untuk mendorong pengungkapan CSR secara luas.

Berdasarkan hasil pengujian statistik secara parsial variabel karakteristik GCG terhadap luas pengungkapan CSR di Indonesia dengan menggunakan analisis regresi berganda, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan di Indonesia.
2. Faktor Jumlah rapat Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan di Indonesia.
3. Faktor Independensi Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan di Indonesia.
4. Faktor Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan di Indonesia.
5. Faktor Jumlah rapat Komite Audit tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan di Indonesia.
6. Faktor Kompetensi Komite Audit yang menyangkut bidang keuangan (*financial literacy*) tidak mempengaruhi luas pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan di Indonesia.
7. Faktor Kepemilikan saham manajerial tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan di Indonesia.
8. Kepemilikan saham Institusional secara tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan di Indonesia.

9. Faktor Kepemilikan saham Asing tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan di Indonesia.
10. Faktor Kepemilikan saham terkonsentrasi berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan di Indonesia.
11. Faktor Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan di Indonesia.
12. Faktor *Leverage* perusahaan berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan di Indonesia.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain:

1. Jumlah sampel yang relatif terbatas, hanya 116 dari 407 perusahaan yang ada, dikarenakan kesulitan memperoleh data *annual report* secara lengkap.
2. Terdapat unsur subjektivitas dalam menentukan indeks pengungkapan. Hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan baku yang dapat dijadikan standar atau acuan, sehingga penentuan indeks untuk indikator dalam kategori yang sama dapat berbeda untuk setiap peneliti.
3. Periode pengamatan terbatas hanya satu tahun, yaitu hanya pada tahun 2008, sehingga mungkin tidak dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya mengenai praktik dan pengungkapan tanggung jawab sosial.
4. Tingkat *Adjusted R²* yang rendah dari model yang diuji 0,417 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel lain yang tidak digunakan

dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

5.3 Saran

Dari simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Pemerintah hendaknya menetapkan regulasi yang secara tegas dan jelas mengatur mengenai praktik dan pengungkapan, serta pengawasan CSR pada perusahaan di Indonesia sehingga praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia semakin meningkat.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas periode pengamatan agar dapat lebih menggambarkan kondisi pengungkapan CSR di Indonesia.
3. Rendahnya *Adjusted R²* dari model yang diuji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan variabel lainnya juga diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

DARTAR PUSTAKA

- Akhtarudin, Mohamed., Monirul Alam Hossain., Mahmud Hossain., dan Lee Yao. 2009. "Corporate Governance and Voluntary Disclosure in Corporate Annual Reports of Malaysian Listed Firms". *JAMAR*. Vol. 7, November.
- Alijoyo, F. Antonius. 2003. Seminar Nasional GCG "Keberadaan dan Peran Komite Audit dalam rangka Implementasi GCG". Surabaya.
- Amran, Azlan dan S. Susela Devi. 2008. "The Impact Of Government And Foreign Affiliate Influence On Corporate Social Reporting (The Case Of Malaysia)". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 23, No. 4, hal. 386-404.
- Angraini, Fr. RR. 2006. "Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar pada Bursa Efek Jakarta)". *Simposium Nasional Akuntansi 9*. Padang.
- Belkaoui, A. dan PG. Karpik. 1989. "Determinants of the Corporate Decision to Disclose Social Information". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 2, No. 1, hal. 36-51.
- Boediono, Gideon SB. 2005. "Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Dampak Manajemen Laba Dengan Menggunakan Analisis Jalur". *Simposium Nasional Akuntansi 8*. Solo.
- Forum Corporate Governance Indonesia (FCGI). 2002. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan (corporate governance)*. Jakarta
- Ghozali, Imam. 2007. *SPSS. Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Undip: Semarang.
- Ghozali, I dan A. Chariri, 2007. *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Undip. Semarang.
- Global Reporting Initiatives (GRI). 2006. *Sustainability reporting Guidelines*. Amsterdam.
- Gray, R., R. Kouhy, dan S. Lavers. 1995. "Corporate Social and Environmental Reporting. A Review of the Literature and a Longitudinal Study of UK

- Disclosure". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 8, No. 2, Hal. 47-77
- Hackston, D., dan M.J. Milne. 1996. "Some determinants of social and environmental disclosures in New Zealand companies". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 9, No. 1, hal 77-108.
- Haniffa, R.M. dan Cooke, T.E. 2002. "Culture, corporate governance and disclosure in Malaysian corporations", *Abacus*, Vol. 38 No. 3.
- Hashim, Hafiza Aishah dan Devi, S. Susela. 2007. "Corporate Governance, Ownership Structure And Earnings Quality: Malaysian Evidence". Universiti Malaya.
- Hendriksen, Eldon S., dan Michael F. Van Breda. 2000. Teori Akuntansi terjemahan dari *Accounting Theory*. Interaksara. Jakarta
- Herawaty, Vinola. 2008. "Peran Praktek *Corporate Governance* sebagai *Moderating Variable* dari Pengaruh *Earnings Management* terhadap Nilai Perusahaan". *Simposium Nasional Akuntansi 11*. Pontianak.
- Huafang, Xiao dan Jianguo, Yuan. 2007. "Ownership structure, board composition and corporate voluntary disclosure: Evidence from listed companies in China". *Managerial Auditing Journal* Vol. 22 No. 6.
- Ibrahim, Majid. 2007. "Pengaruh struktur internal governance terhadap earning manajemen" *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Universitas Diponegoro.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2007. *Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007*. Jakarta: Salemba Empat.
- Inawesnia, Kania. 2008. "Motif Dibalik Praktik dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* : dari *Stakeholder* ke *Award*". *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Universitas Diponegoro.
- Isnanta, Rudi. 2008. "Pengaruh Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan terhadap manajemen laba dan kinerja keuangan". *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Universitas Islam Indonesia.
- Jensen, Michael C., dan Meckling William H. 1976. "Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics* 3. hal 305-360.
- Kaihatu, Thomas S. 2006. "Good corporate governance dan penerapannya di Indonesia". *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* Vol.8 No.1 Maret 2006.

- Komite Nasional Kebijakan Governace (KNKG). 2006. *Pedoman UMum Good Corporate Governance di Indonesia*. Jakarta.
- Machmud, Novita dan Chaerul D. Djakman. 2008. “Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR Disclosure) Pada Laporan Tahunan Perusahaan: Studi Empiris Pada Perusahaan Publik Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006”. *Simposium Nasional Akuntansi 11*. Pontianak.
- Matoussi, Hamadi, dan Chakroun, Raida. 2008. ” Board Composition, Ownership Structure And Voluntary Disclosure In Annual Reports: Evidence From Tunisia” *Laboratoire Interdisciplinaire De Gestion Université-Entreprise (LIGUE)*.
- Maulana, M. Maki Y.P. 2008. “Corporate Social Responsibility: Kepatuhan terhadap Perturan, Legitimasi, ataukah Award?”. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Universitas Diponegoro.
- Mayasto, Hartawan Hari. 2008. “Pengaruh struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan institusional ukuran perusahaan dan jumlah dewan komisaris perusahaan terhadap pengaturan laba (earning manajemen)”. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mizrawati, Alfathira. 2009. “ Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Transparansi Perusahaan (Tinjauan dari Agency Theory dan Stewardship Theory)”. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Universitas Diponegoro.
- Muntoro, Ronny Kusuma. 2006. Makalah “Mebangun Dewan Komisaris yang Efektif”. Universitas Indonesia.
- Mursalim. 2007. “ Simultanitas Aktivisme Institusional, Struktur Kepemilikan, Kebiakan Deviden dan Utang dalam Mengurangi Konflik Keagenan”. *Simposium Nasional Akuntansi 10*. Makassar.
- Nasir, Mohd N.A. dan Abdullah, S.N. 2004. ”Voluntary disclosure and corporate governance among financially distressed firms in Malaysia” *Financial Reporting, Regulation and Governance*, Vol. 3 No. 1.
- Nuryaman. 2008. “Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan,Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba”. *Simposium Nasional Akuntansi 11*. Pontianak
- Oktapiyani, Desi. 2009. “ Pengaruh penerapan corporate governance terhadap likuiditas perbankan nasional”. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Universitas Diponegoro.

- Puspitasari, Apriani Daning. 2009. "Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR pada laporan tahunan perusahaan di Indonesia". *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Universitas Diponegoro.
- Putri, Anggi Miharsa. 2009. "Pengaruh Independensi dan efektivitas Komite Audit terhadap Manajemen Laba". *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Universitas Diponegoro.
- Rahayu, Sovi Ismawati. 2008. "Pengaruh Tingkat Ketaatan Pengungkapan Wajib dan Luas Pengungkapan Sukarela terhadap Kualitas Laba". *Simposium Nasional Akuntansi 11*. Pontianak
- Rahman, Rashidah Abdul dan Ali, Fairuzana Haneem Mohamed. 2006. "Board, Audit Committee, culture and earning management: Malaysian evidence". *Managerial Auditing Journal*. Vol. 21, No. 7, hal. 783-804.
- Ristyaningrum, Arin. 2009. "Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Struktur Kepemilikan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur". *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Universitas Diponegoro.
- Rosmasita, H. 2007. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Sosial (Social Disclosure) Dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta". *Skripsi tidak dipublikasikan*. Universitas Islam Indonesia.
- Said, Roshima.,Yuserrie Hj Zainuddin., dan Hasnah Haron. 2009. "The Relationship between Corporate Social Responsibility and Corporate Governance Characteristics in Malaysian Public Listed Companies". *Social Responsibility Journal*. Vol. 5, No. 2, hal. 212-226.
- Sayekti, dan Wondabio. 2007. "Pengaruh CSR Disclosure Terhadap Earnings Response Coefficient". *Simposium Nasional Akuntansi 10*. Makassar.
- Sembiring, Eddy Rismanda. 2005. "Perkembangan Corporate Social Responsibility di Indonesia". *Simposium Nasional Akuntansi 8*. Solo.
- Solihin, Ismail. 2009. *Corporate social responsibility from charity to sustainability*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sulastini, Sri. 2007. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Social Disclosure Perusahaan Manufaktur Yang Telah Go Public". *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Universitas Negeri Semarang.

- Surya, Indra., dan Ivan Yustiavananda. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance*. FHUI. Jakarta.
- Taridi, Tirmidzi, 2009. Perkembangan GCG di Indonesia. Seminar Nasional “*Rejuvenating Our Teaching Research in Financial Accounting and Modeling GCG in Indonesia*”. Yogyakarta.
- Tarjo. 2008. “Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional dan *Leverage* terhadap Manajemen Laba, Nilai Pemegang Saham serta *Cost of Equity Capital*”. *Simposium Nasional Akuntansi 11*. Pontianak
- Ujiyantho, Muh. Arief., dan Bambang Agus Pramuka. “Mekanisme Corporate Governace, Manajemen Laba dan kinerja keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi 10*. Makassar.
- Untung, Hendrik Budi. 2008. *Corporate social responsibility*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Utama, Sidharta. 2007. “Evaluasi infrastruktur pendukung pelaporan tanggung Jawab sosial dan lingkungan di Indonesia”. *Pidato ilmiah pengukuhan guru besar FEUI*. Jakarta
- Wahyudi, Untung dan Hartini Setyaning Prawesti. 2006. “Implikasi Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Keputusan Keuangan Sebagai Variabel Intervening”. *Simposium Nasional Akuntansi 9*. Padang.
- Waryanti. 2009. “ Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Sosial pada Perusahaan Manufaktur di BEI”. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Universitas Diponegoro.
- Widowati, Nungki. 2009. “ Pengaruh corporate governance terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di BEI”. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Universitas Diponegoro.
- World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). 2000. “*WBCSD’s first report-Corporate social Responsibility*”. Geneva.
- Www.csrindonesia.com
- Yu, Guanghua dan Shao, Li. 2007. “Against Legal Origin: Of Ownership Concentration And Disclosure”. University of Hong Kong.

LAMPIRAN

LAMPIRAN A

Daftar Indikator Pengungkapan CSR menurut GRI

INDIKATOR KINERJA EKONOMI	
Kinerja Ekonomi	
EC 1	Nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan secara langsung, termasuk pendapatan, biaya operasi, kompensasi kepada karyawan, donasi dan investasi ke masyarakat, laba ditahan serta pembayaran ke penyedia modal dan pemerintah.
EC 2	Implikasi keuangan dan berbagai risiko dan peluang untuk segala aktivitas perusahaan dalam menghadapi perubahan iklim.
EC 3	Daftar cakupan kewajiban perusahaan dalam perencanaan benefit yang sudah ditetapkan.
EC 4	Bantuan keuangan finansial signifikan yang diperoleh dari pemerintah.
Keberadaan Pasar	
EC 5	Parameter standar upah karyawan di jenjang awal dibandingkan dengan upah karyawan minimum yang berlaku pada lokasi operasi tertentu.
EC 6	Kebijakan, penerapan dan pembagian pembelanjaan pada subkontraktor (mitra kerja) setempat yang ada di berbagai lokasi operasi.
EC 7	Prosedur penerimaan tenaga kerja lokal dan beberapa orang di level manajemen senior yang diambil dari komunitas setempat di beberapa lokasi operasi.
Dampak Ekonomi Tidak Langsung	
EC 8	Pengembangan dan dampak dari investasi infrastruktur dan pelayanan yang disediakan terutama bagi kepentingan publik melalui perdagangan, jasa dan pelayanan atau pun yang sifatnya pro bono.
EC 9	Pemahaman dan penjelasan atas dampak ekonomi secara tidak langsung, termasuk luasan dampak.
INDIKATOR KINERJABIDANG LINGKUNGAN	
Material	
EN 1	Material yang digunakan dan diklasifikasikan berdasarkan berat dan ukuran.
EN 2	Persentase material bahan daur ulang yang digunakan.
Energi	
EN 3	Pemakaian energi yang berasal dari sumber energi utama baik secara langsung maupun tidak langsung
EN 4	Pemakaian energi yang berasal dari sumber utama secara tidak langsung.
EN 5	Energi yang berhasil dihemat berkat adanya efisiensi dan konservasi yang lebih baik.
EN 6	Inisiatif penyediaan produk dan jasa yang menggunakan energi efisien atau sumber daya terbarukan, serta pengurangan penggunaan energi sebagai dampak dari inisiatif ini.
EN 7	Inisiatif dalam hal pengurangan pemakaian energi secara tidak langsung dan pengurangan yang berhasil dilakukan.
Air	
EN 8	Total pemakaian air dari sumbernya.
EN 9	Pemakaian air yang memberi dampak cukup signifikan pada sumber mata air.
EN 10	Persentase dan total jumlah air yang didaur ulang dan digunakan kembali.

Keanekaragaman Hayati	
EN 11	Lokasi dan luas lahan yang dimiliki, disewakan, dikelola, atau berdekatan dengan area yang dilindungi dan area dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar area yang dilindungi.
EN 12	Deskripsi dampak signifikan yang ditimbulkan oleh aktivitas, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati yang ada di wilayah yang dilindungi serta area dengan nilai keanekaragaman hayati di luar wilayah yang dilindungi.
EN 13	Habitat yang dilindungi atau dikembalikan kembali.
EN 14	Strategi, aktivitas saat ini dan rencana masa depan untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati.
EN 15	Jumlah spesies IUCN Red List dan spesies yang masuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di wilayah yang terkena dampak operasi, berdasarkan risiko kepunahan.
Emisi, Effluent, dan Limbah	
EN 16	Total emisi gas rumah kaca secara langsung dan tidak langsung yang diukur berdasarkan berat.
EN 17	Emisi gas rumah kaca secara tidak langsung dan relevan yang diukur berdasarkan berat.
EN 18	Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pengurangan yang berhasil dilakukan.
EN 19	Emisi dari substansi perusak lapisan ozon yang diukur berdasarkan berat.
EN 20	NO, SO dan emisi udara lain yang signifikan dan diklasifikasikan berdasarkan jenis dan berat.
EN 21	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan.
EN 22	Total berat dari limbah yang diklasifikasikan berdasarkan jenis dan metode pembuangan.
EN 23	Total biaya dan jumlah yang tumpah.
EN 24	Berat dari limbah yang ditransportasikan, diimpor, diekspor atau diolah yang diklasifikasikan berbahaya berdasarkan Basel Convention Annex I, II, III, dan VIII, dan persentase limbah yang dikapalkan secara internasional.
EN 25	Identitas, ukuran, status yang dilindungi dan nilai keanekaragaman hayati yang terkandung di dalam air dan habitat yang ada disekitarnya secara signifikan terkena dampak akibat adanya laporan mengenai kebocoran dan pemborosan air yang dilakukan oleh perusahaan.
Produk dan Jasa	
EN 26	Inisiatif untuk mengurangi dampak buruk pada lingkungan yang diakibatkan oleh produk dan jasa, dan memperluas dampak dari inisiatif ini.
EN 27	Persentase dari produk yang terjual dan materi kemasan dikembalikan berdasarkan kategori.
Kesesuaian	
EN 28	Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan dan hukum lingkungan hidup.
Transport	
EN 29	Dampak signifikan terhadap lingkungan yang diakibatkan adanya transportasi produk, benda lain dan materi yang digunakan perusahaan dalam operasinya mengirim para pegawainya.

Keseluruhan	
EN 30	Jumlah biaya untuk perlindungan lingkungan dan investasi berdasarkan jenis kegiatan.
INDIKATOR PRAKTEK TENAGA KERJA DAN KINERJA PEKERJA YANG LAYAK	
Ketenagakerjaan	
LA 1	Komposisi jumlah tenaga kerja berdasarkan tipe pekerjaan, kontrak kerja dan lokasi.
LA 2	Jumlah total dan rata-rata turnover tenaga kerja berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin dan area.
LA 3	Benefit yang diberikan kepada pegawai tetap.
Hubungan Tenaga Kerja / Manajemen	
LA 4	Persentase pegawai yang dijamin oleh ketetapan hasil negosiasi yang dibuat secara kolektif.
LA 5	Batas waktu minimum pemberitahuan yang terkait mengenai perubahan kebijakan operasional, termasuk mengenai apakah hal tersebut akan tercantum dalam perjanjian bersama.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
LA 6	Persentase total pegawai yang ada dalam struktur formal manajemen, yaitu komite keselamatan dan kesehatan kerja yang membantu mengawasi dan memberi arahan dalam program keselamatan dan kesehatan kerja.
LA 7	Tingkat dan jumlah kecelakaan, jumlah hari hilang, dan tingkat absensi yang ada dilihat berdasarkan area.
LA 8	Program pendidikan, pelatihan, pembimbingan, pencegahan dan pengendalian risiko diadakan untuk membantu pegawai, keluarga mereka dan lingkungan sekitar dalam menanggulangi penyakit serius.
LA 9	Hal-hal mengenai keselamatan dan kesehatan kerja tercantum secara formal dan tertulis dalam sebuah perjanjian bersama serikat pekerja.
Pendidikan dan Pelatihan	
LA 10	Jumlah waktu rata-rata untuk pelatihan setiap tahunnya, setiap pegawai berdasarkan kategori pegawai.
LA 11	Program keterampilan manajemen dan pendidikan jangka panjang yang mendukung kecakapan para pegawai dan membantu mereka untuk maju dan terus berkarir.
LA 12	Persentase dari para pegawai yang menerima penilaian atas performa dan perkembangan karir mereka secara berkala.
Keanekaragaman dan Kesempatan Yang Sama	
LA 13	Komposisi badan tata kelola dan penjabaran pegawai berdasarkan kategori seperti jenis kelamin, usia, kelompok minoritas dan indikasi keanekaragaman lainnya.
LA 14	Perbandingan upah standar antara pria dan wanita berdasarkan kategori pegawai.
INDIKATOR KINERJA HAK ASASI MANUSIA	
Praktik Investasi dan Pengadaan	
HR 1	Persentase dan total jumlah perjanjian investasi yang ada dan mencakup pasal mengenai hak asasi manusia atau telah melalui evaluasi mengenai hak asasi manusia.
HR 2	Persentase dari mitra kerja dan pemasok yang telah melalui proses seleksi berdasarkan prinsip-prinsip HAM yang telah dijalankan.

HR 3	Total jumlah waktu pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur yang terkait dengan aspek HAM yang berhubungan dengan prosedur kerja, termasuk persentase pegawai yang dilatih.
Non-Diskriminasi	
HR 4	Total jumlah kasus diskriminasi dan langkah penyelesaian masalah yang diambil.
Kebebasan Berserikat dan Daya Tawar Kelompok	
HR 5	Prosedur kerja yang teridentifikasi di mana hak untuk melatih kebebasan berserikat dan perundingan bersama menjadi berisiko dan langkah yang diambil untuk mendukung hak kebebasan berserikat tersebut.
Tenaga Kerja Anak	
HR 6	Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki risiko akan adanya pekerja anak dan langkah yang diambil untuk menghapuskan pekerja anak.
Pegawai Tetap dan Kontrak	
HR 7	Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki risiko akan adanya pegawai tetap dan kontrak, dan langkah yang diambil untuk menghapuskan pegawai tetap.
Praktik Keselamatan	
HR 8	Persentase petugas keamanan yang dilatih sesuai dengan kebijakan atau prosedur perusahaan yang terkait dengan aspek HAM dan prosedur kerja.
Hak Masyarakat (Adat)	
HR 9	Total jumlah kasus pelanggaran yang berkaitan dengan hak masyarakat adat dan langkah yang diambil.
INDIKATOR KINERJA KEMASYARAKATAN	
Kemasyarakatan	
SO 1	Sifat, cakupan, dan keefektifan atas program & kegiatan apapun yang menilai & mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, termasuk saat memasuki wilayah operasi, selama beroperasi & pasca operasi.
Korupsi	
SO 2	Persentase dan total jumlah unit usaha yang dianalisa memiliki risiko terkait tindak penyuapan dan korupsi.
SO 3	Persentase jumlah pegawai yang dilatih dalam prosedur dan kebijakan perusahaan terkait penyuapan dan korupsi.
SO 4	Langkah yang diambil dalam mengatasi kasus tindak penyuapan dan korupsi.
Kebijakan Publik	
SO 5	Deskripsi kebijakan umum dan kontribusi dalam pengembangan kebijakan umum dan prosedur lobi.
SO 6	Perolehan keuntungan secara finansial dan bentuk keuntungan lainnya yang diperoleh dari hasil kontribusi kepada partai politik, politisi dan instansi terkait oleh negara.
Perilaku Anti persaingan	
SO 7	Total jumlah tindakan hukum terhadap sikap anti kompetisi dan praktek monopoli dan kecurangan-kecurangan yang dihasilkan dari praktek-praktek tersebut.
Kesesuaian	
SO 8	Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat pelanggaran hukum dan kebijakan.

INDIKATOR KINERJA TANGGUNG JAWAB DARI DAMPAK PRODUK	
Keselamatan dan Kesehatan Konsumen	
PR 1	Proses dan tahapan kerja dalam mempertahankan kesehatan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan produk atau jasa yang dievaluasi untuk perbaikan dan persentase dari kategori produk dan jasa yang terkait dalam prosedur tersebut.
PR 2	Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan konsumen dalam keseluruhan proses, diukur berdasarkan hasil akhirnya.
Labelling Produk dan Jasa	
PR 3	Jenis informasi produk dan jasa yang dibutuhkan dalam prosedur kerja, dan persentase produk dan jasa yang terkait dalam prosedur tersebut.
PR 4	Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan informasi produk dan jasa, dan pelabelan, diukur berdasarkan hasil akhirnya.
PR 5	Praktek-praktek yang terkait dengan kepuasan konsumen, termasuk hasil survey evaluasi kepuasan konsumen.
Komunikasi Pemasaran	
PR 6	Program-program yang mendukung adanya standar hukum dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan komunikasi penjualan, termasuk iklan, promosi dan bentuk kerjasama.
PR 7	Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan komunikasi penjualan, termasuk iklan, promosi dan bentuk kerjasama, diukur berdasarkan hasil akhirnya.
Privasi Konsumen	
PR 8	Jumlah total pengaduan yang tervalidasi yang berkaitan dengan pelanggaran privasi konsumen dan data konsumen yang hilang.
Kesesuaian	
PR 9	Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat pelanggaran hukum dan kebijakan yang terkait dengan pengadaan dan penggunaan produk dan jasa.

Sumber : GRI (Global Reporting Initiatives) G3 Guidelines

LAMPIRAN B

Daftar Perusahaan Sampel Penelitian

No	Tipe Industri	Nama Perusahaan	Kode Saham
1	Agriculture	Astra Agro Lestari Tbk.	AALI
2		Bakrie Sumatra Plantation Tbk.	UNSP
3		Central Proteinaprima Tbk.	CPRO
4		Multibreeder Adirama Indonesia Tbk.	MBAI
5		Sampoerna Agro Tbk.	SGRO
6		SMART Tbk.	SMAR
7	Mining	Aneka Tambang Tbk.	ANTM
8		Bayan Resources Tbk.	BYAN
9		Bukit Asam Tbk.	PTBA
10		Elnusa Tbk.	ELSA
11		Energi Mega Persada Tbk.	ENRG
12	Basic Industry & Chemical	Asahimas Flat Glass Tbk.	AMFG
13		Dynaplast Tbk.	DYNA
14		Fajar Surya Wisesa Tbk.	FASW
15		Holcim Tbk.	SMCB
16		Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.	INTP
17		Semen Gresik Tbk.	SMGR
18		Sierad Produce Tbk.	SIPD
19		Sorini Agro Asia Corporindo Tbk.	SOBI
20		Tri Polyta Indonesia Tbk.	TPIA
21		Miscellaneous	Astra Internasional Tbk.
22	Astra Otoparts Tbk.		AUTO
23	Gajah Tunggal Tbk.		GJTL
24	Kabelindo Murni Tbk.		KBLM
25	Selamat Sempurna Tbk.		SMSM
26	Voksel Electric Tbk.		VOKS
27	Consumer Goods	Aqua Golden Mississippi Tbk.	AQUA
28		Bentoel International Investama Tbk.	RMBA
29		Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.	HMSP
30		Indofarma Tbk.	INAF
31		Kalbe Farma Tbk.	KLBF
32		Mandom Indonesia Tbk.	TCID
33		Merck Tbk.	MERK
34		Unilever indonesia Tbk.	UNVR
35	Property, Real Estate, & Construction	Adhi Karya Tbk.	ADHI
36		BakrieLand Development Tbk.	ELTY
37		Bhuwanatala Indah Permai Tbk.	BIPP
38		Cowell Development Tbk.	COWL
39		Duta Anggada realty Tbk.	DART
40		Duta Graha Indah Tbk.	DGIK
41		Global Land Development Tbk.	KPIG
42		Gowa Makassar Tourism Development Tbk.	GMTD
43		Intiland Development Tbk.	DILD

44		Jakarta International Hotels & Development Tbk.	JIHD
45		Pakuwon Jati Tbk.	PWON
46		Surya Semesta Internusa Tbk.	SSIA
47		Suryamas Dutamakmur Tbk.	SMDM
48		Wijaya Karya Tbk.	WIKA
49	Infrastructure, Utilities, & Transportation	Excelcomindo Pratama Tbk.	EXCL
50		Indonesia Air Transport Tbk.	AITA
51		Indosat Tbk.	ISAT
52		Mobile-8 Telecom Tbk.	FREN
53		Panorama Transportasi Tbk.	WEHA
54		Pelayaran Tempuran Mas Tbk.	TMAS
55		Perusahaan gas Negara Tbk.	PGAS
56		Telekomunikasi Indonesia Tbk.	TLKM
57	Finance	Adira Finance Tbk.	ADMF
58		Asuransi Bintang Tbk.	ASBI
59		Asuransi Dayin Mitra Tbk.	ASDM
60		Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.	AHAP
61		Bank Artha Graha Internasional Tbk.	INPC
62		Bank central Asia Tbk.	BBCA
63		Bank Negara Indonesia Tbk.	BBNI
64		Bank Rakyat Indonesia Tbk.	BBRI
65		Bank Bukopin Tbk.	BBKP
66		Bank Bumi Arta Tbk.	BNBA
67		Bank Bumiputera Indonesia Tbk.	BABP
68		Bank CIMB Niaga Tbk.	BNGA
69		Bank Danamon Indonesia Tbk.	BDMN
70		Bank Ekonomi Raharja Tbk.	BAEK
71		Bank Himpunan Saudara Tbk.	SDRA
72		Bank Internasional Indonesia Tbk.	BNII
73		Bank Kesawan Tbk.	BKSW
74		Bank Mandiri Tbk.	BMRI
75		Bank Mega Tbk.	MEGA
76		Bank OCBC NISP Tbk.	NISP
77		Bank Pan Indonesia Tbk.	PNBN
78		Bank Permata Tbk.	BNLI
79		Bank Swadesi Tbk.	BSWD
80		Bank UOB Buana Tbk.	BBIA
81		Bhakti Capital Indonesia Tbk.	BCAP
82		Buana Finance Tbk.	BBLD
83		Duta Kirana Finance Tbk.	DKFT
84		Equity Development Investment Tbk.	GSMF
85		Indocitra Finance Tbk.	INCF
86		Kresna Graha Sekurindo Tbk.	KREN
87		Lippo General Insurance Tbk.	LPGI
88		Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk.	MREI
89		Pacific Utama Tbk.	LPPF
90		Panin Sekuritas Tbk.	PANS

91	Trade, Service, & Investment	Ace Hardware Indonesia Tbk.	ACES
92		Agis Tbk.	TMPI
93		Alfa Retailindo Tbk.	ALFA
94		Anta Express Tour and Travel Service Tbk.	ANTA
95		Astra Graphia Tbk.	ASGR
96		Bakrie and Brothers Tbk.	BNBR
97		Bhakti Investama Tbk.	BHIT
98		Centrin Online Tbk.	CENT
99		Enseval Putera Megatrading Tbk.	EPMT
100		Hexindo Adiperkasa Tbk.	HEXA
101		Hotel Sahid Jaya International Tbk.	SHID
102		Jakarta Setiabudi Internasional Tbk.	JSPT
103		Mas Murni Indonesia Tbk.	MAMI
104		Metrodata Electronic Tbk.	MTDL
105		Milennium Pharmacon International Tbk.	SDPC
106		Modern Internasional Tbk.	MDRN
107	Multi Indocitra Tbk.	MICE	
108	Pelita Sejahtera Abadi Tbk.	PSAB	
109	Pembangunan Jaya Ancol Tbk.	PJAA	
110	Plaza Indonesia Realty Tbk.	PLIN	
111	Pool Advista Indonesia Tbk.	POOL	
112	Tempo Inti Media Tbk.	TMPO	
113	Tigaraksa Satria Tbk.	TGKA	
114	Tira Austenite Tbk.	TIRA	
115	Tunas Ridean Tbk.	TURI	
116	United Tractors Tbk.	UNTR	

Sumber : IDX Statistics 2008, diolah

LAMPIRAN C

Hasil Pengolahan Data Dengan SPSS 17.0

Descriptives

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
UKOM	116	2	10	4.72	1.854
RAKOM	116	1	51	8.87	8.963
INKOM	116	.2000	1.0000	.436792	.1285354
UDIT	116	2	7	3.44	.935
RADIT	116	1	51	10.26	9.174
KOMDIT	116	1	5	1.84	.938
MANJ	116	.000	77.700	2.14192	10.350370
INST	116	.0000	99.8900	42.165603	33.3399826
ASING	116	.0000	99.8000	27.280500	30.7995591
KONST	116	0	1	.59	.493
SIZE	116	10.1335	14.5544	12.425369	.8886195
LEV	116	-13.4067	14.9646	2.737468	3.8650753
CSRI	116	.0633	.6076	.206133	.0862054
Valid N (listwise)	116				

Regression

Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LEV, MANJ, KONST, ASING, RADIT, UKOM, KOMDIT, INKOM, RAKOM, UDIT, SIZE, INST ^a		Enter

a. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.691 ^a	.478	.417	.0658346

a. Predictors: (Constant), LEV, MANJ, KONST, ASING, RADIT, UKOM, KOMDIT, INKOM, RAKOM, UDIT, SIZE, INST

b. Dependent Variable: CSRI

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.408	12	.034	7.848	.000 ^a
	Residual	.446	103	.004		
	Total	.855	115			

a. Predictors: (Constant), LEV, MANJ, KONST, ASING, RADIT, UKOM, KOMDIT, INKOM, RAKOM, UDIT, SIZE, INST

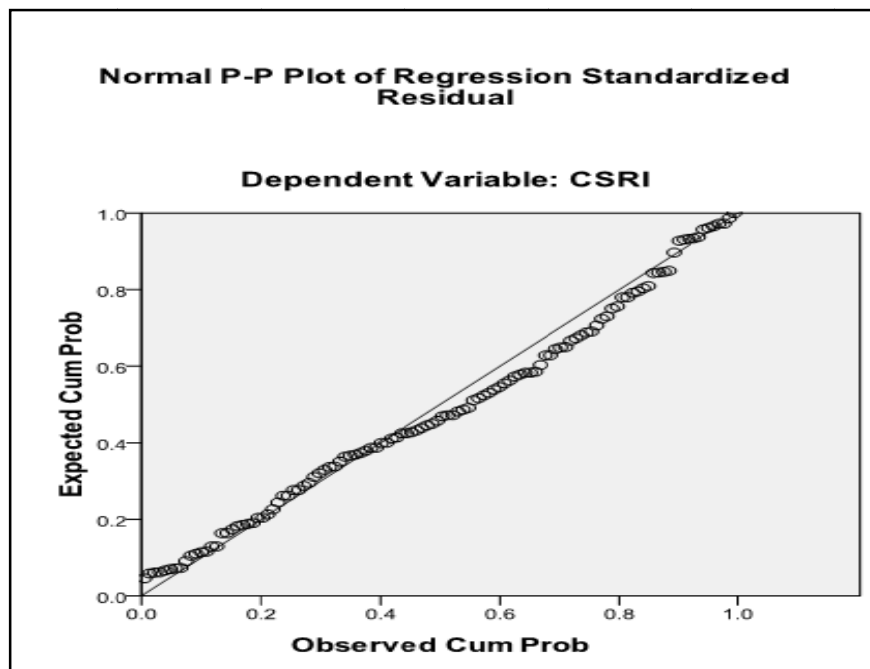
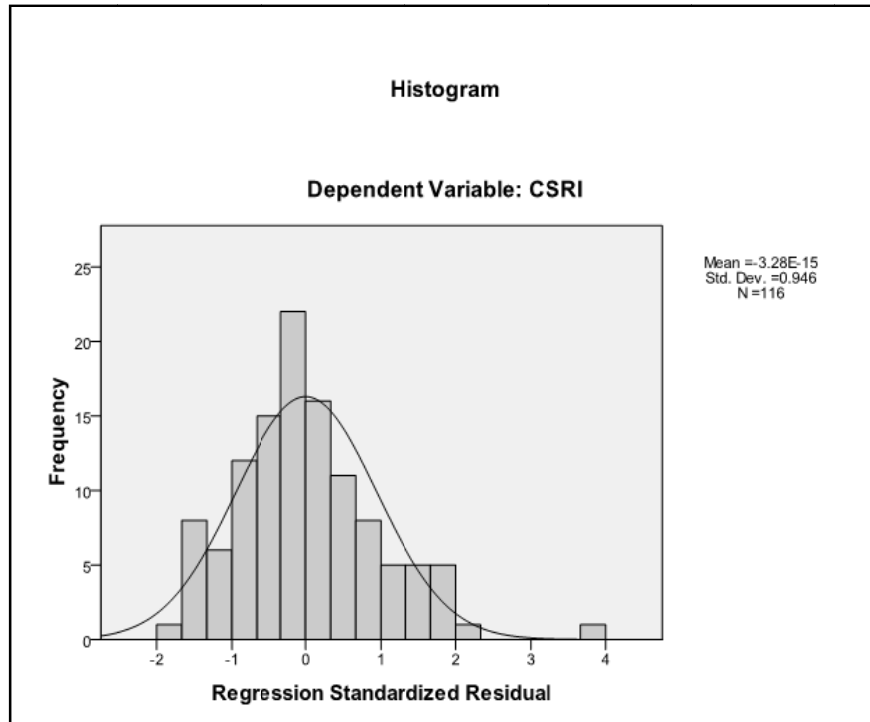
b. Dependent Variable: CSRI

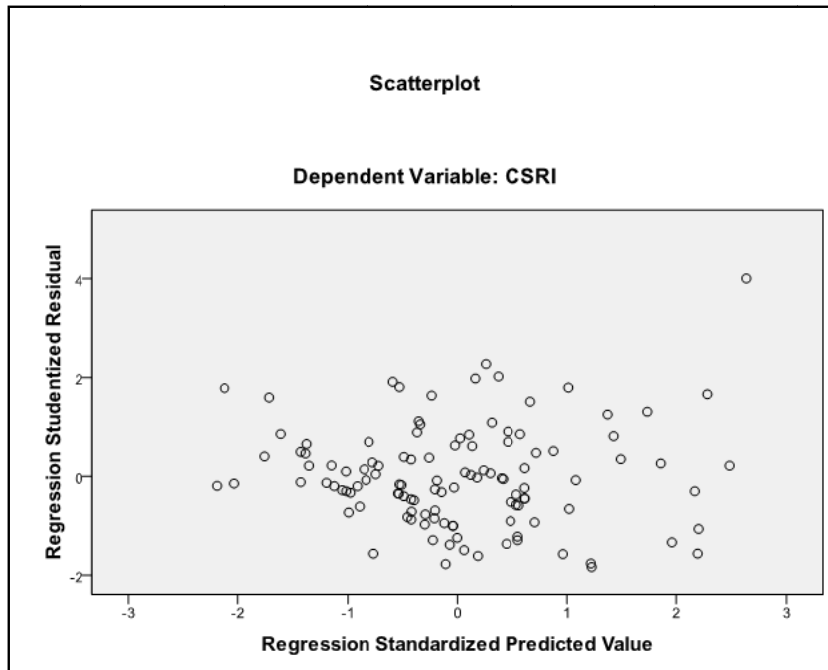
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.418	.129		-3.238	.002		
UKOM	.002	.004	.051	.560	.576	.615	1.625
RAKOM	.001	.001	.147	1.641	.104	.629	1.589
INKOM	-.019	.058	-.029	-.334	.739	.672	1.487
UDIT	.006	.010	.063	.580	.563	.432	2.317
RADIT	.001	.001	.130	1.524	.131	.693	1.443
KOMDIT	-.017	.009	-.184	-1.847	.068	.512	1.954
MANJ	.000	.001	.060	.786	.434	.876	1.141
INST*	.000	.000	-.287	-2.392	*.019	.353	2.829
ASING	.000	.000	-.202	-1.746	.084	.379	2.641
KONST*	.033	.013	.189	2.544	*.012	.921	1.086
SIZE*	.053	.011	.544	4.738	*.000	.384	2.602
LEV*	-.008	.002	-.365	-3.961	*.000	.596	1.678

a. Dependent Variable: CSRI

Charts





NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		116
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.06230516
Most Extreme Differences	Absolute	.073
	Positive	.073
	Negative	-.042
Kolmogorov-Smirnov Z		.790
Asymp. Sig. (2-tailed)		.560

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.